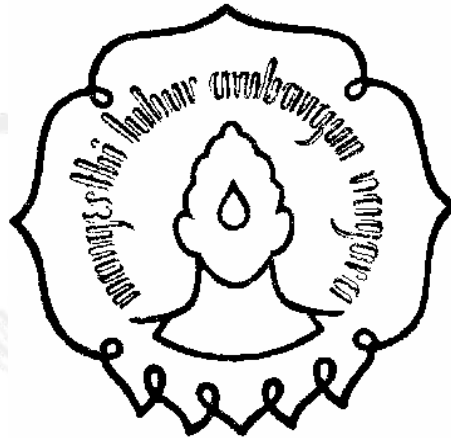


**PERANAN ORGANISASI WANITA TAMAN SISWA
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DI YOGYAKARTA (1932 – 1946)**



Skripsi

Oleh:

KURATUL AINI
K 4402510

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007**

**PERANAN ORGANISASI WANITA TAMAN SISWA
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DI YOGYAKARTA (1922 – 1946)**

Skripsi
Oleh:

KURATUL AINI
K 4402510

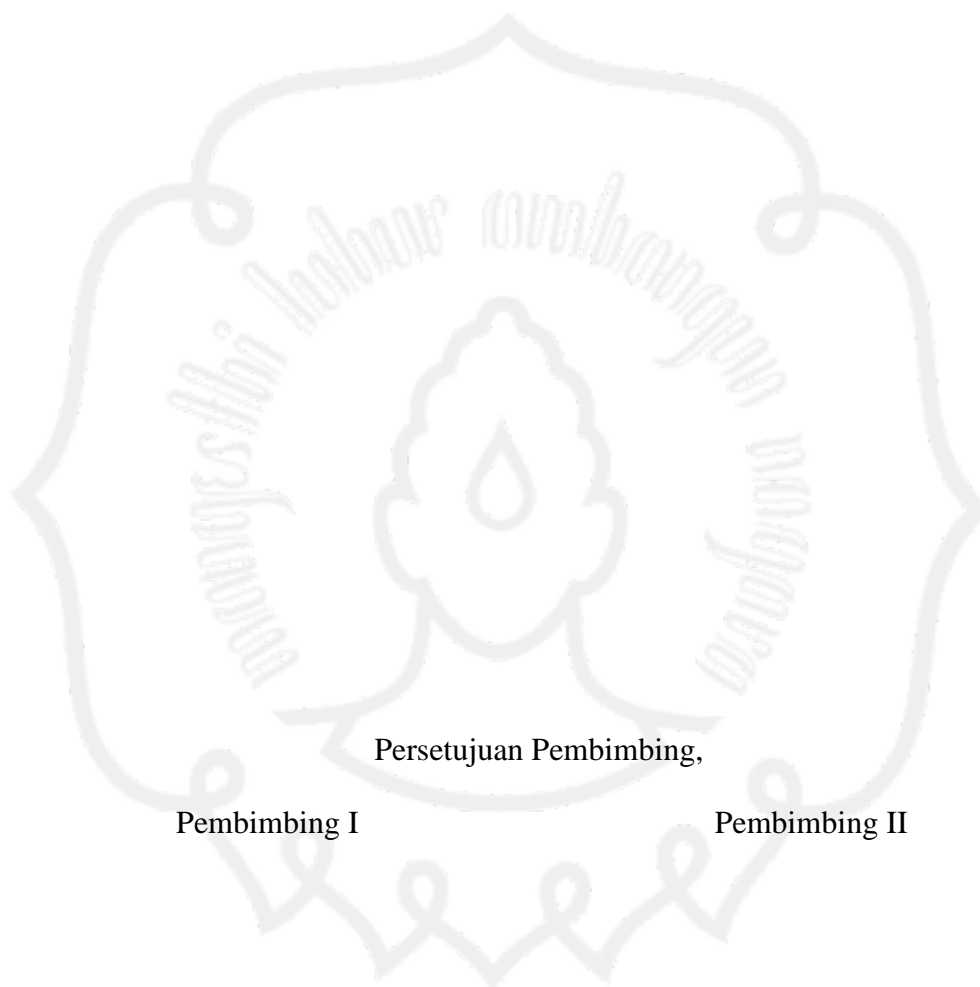
Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007**

PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Persetujuan Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Sri Wahyuning, M.Pd
NIP. 130.902.528

Dra. Sariyatun, M.Pd, M.Hum
NIP. 131 842 673

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari :

Tanggal :

Tim Penguji Skripsi :

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua :

(.....)

Sekretaris :

(.....)

Penguji I :

(.....)

Penguji II :

(.....)

Disahkan oleh:

Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

Drs. Trisno Martono, MM

NIP: 130 539 720

ABSTRAK

Kuratul Aini, PERANAN ORGANISASI WANITA TAMANSISWA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI YOGYAKARTA TAHUN 1922-1946. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta: Januari 2007.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas masalah : (1) latar belakan lahirnya organisasi Wanita Tamansiswa di Yogyakarta; (2) Struktur organisasi Wanita tamansiswa di Yogyakarta; (3) Peranan Wanita Tamansiswa dalam Pengembangan pendidikan di Yogyakarta.

Sejalan dengan masalah dan tujuan Penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode historis sumber yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder . teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik kepustakaan atau studi pustaka. Teknik anklisis yang digunakan adalah teknik analisis histories. Langkah-langkah metode historis adalah (1) Heuristik; (2) Kritik; (3) Interpretasi; (4) Historrografi.

Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kelahiran Organisasi Wanita Tamansiswa dilatarbelakangi oleh kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi rakyat Indonesia terutama bagi kaum wanita, adanya kepincangan-kepincangan pada masyarakat tradisional yang menghambat kemajuan wanita seperti poligami, kawin paksa dan lain sebagainya. Adat istiadat yang kolot telah mendorong kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya yaitu dengan adanya gerakan emansipasi wanita yang dipelopori oleh R.A. Kartini. Cita-cita R.A. Kartini untuk membangun kesadaran kemajuan bagi kaum wanita, kemudian dilanjutkan oleh kaum wanita dalam Taman Siswa yang berada dalam pimpinan Nyi Hajar Dewantara, yang membantu dalam hal pendidikan wanita. Mengingat pentingnya peranan wanita Taman Siswa dalam bidang pendidikan wanita tersebut, maka pimpinan Taman Siswa akhirnya mengesahkan Organisasi Wanita Taman Siswa sebagai organisasi mandiri, maka tetap dalam koridor Organisasi Taman Siswa; (2) Eksistensi organisasi Wanita taman Siswa dalam lingkungan Taman Siswa yaitu untuk membantu segala kegiatan yang dilakukan oleh Taman Siswa khususnya pendidikan bagi kaum wanita. Adapun struktur organisasi wanita Taman Siswa yaitu terdiri dari: a) badan kekuasaan tertinggi dalam organisasi wanita Taman Siswa adalah konggres, b) Badan pusat wanita Taman Siswa adalah pimpinan tertinggi dan merupakan badan pelaksana, c) di tingkat daerah wanita Taman Siswa dipimpin oleh pengurus daerah Wanita Taman Siswa yang dipilih dalam konferensi, d) di tingkat cabang Wanita Taman Siswa dipimpin oleh cabang harian Taman Siswa yang dipilih dalam rapat anggota Wanita Taman Siswa. Adapun tugas Wanita Taman Siswa adalah adalah berusaha untuk mempertinggi dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran Taman Siswa, menjaga ketertiban dan keselamatan Keluarga Taman Siswa sehingga tidak akan terjadi perselisihan diantara anggota keluarga Taman Siswa dan sebagai anggota organisasi tunduk pada apa yang telah menjadi ketentuan anggota. Sedangkan kewajiban Organisasi Wanita Taman

Siswa adalah wajib membantu Taman Siswa dalam segala usahanya terutama dalam pendidikan kewanitaan dan kesucian dalam masyarakat Taman Siswa, dan wajib menjalin hubungan dengan organisasi wanita lainnya; (3) Peranan Organisasi Wanita Taman Siswa dalam pengembangan pendidikan di Yogyakarta adalah meningkatkan pendidikan khususnya bagi kaum wanita, yang ditempuh dengan jalan, baik ke dalam maupun ke luar. Peran ke dalam Organisasi Wanita Taman Siswa yaitu : membantu Taman Siswa dalam segala usahanya baik di bidang kebudayaan dan pendidikan khususnya pendidikan kewanitaan seperti membantu Taman Siswa dalam menentang Undang-Undang Pengawasan Sekolah Liar yang dianggap menghambat kesempatan orang pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan peran keluar Organisasi Wanita Taman Siswa yaitu selalu aktif memperjuangkan peningkatan derajat dan martabat kaum wanita dengan cara menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi wanita lainnya.



MOTTO

“Kewajiban yang diserahkan oleh Alam kepada seorang wanita adalah menjadi Ibu, pendidik manusia yang pertama”

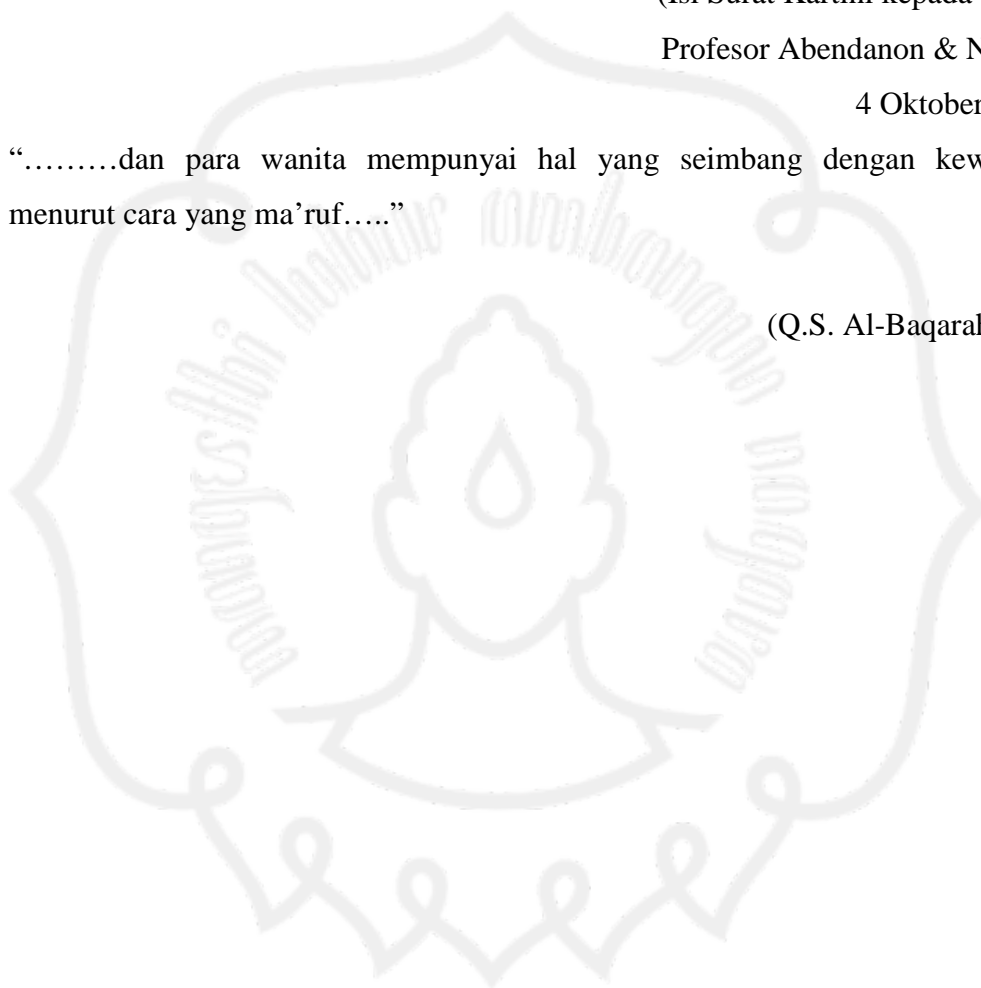
(Isi Surat Kartini kepada

Profesor Abendanon & Nvonva

4 Oktober 1902)

“.....dan para wanita mempunyai hal yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf.....”

(Q.S. Al-Baqarah: 228)



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan:

- Bapak dan Ibuku (alm) tercinta
- Adik-adikku tersayang
- Teman-temanku Program Studi Sejarah angkatan 2002
- Semua pihak yang telah mendukung terselesainya skripsi ini
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis tentu saja tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan izin penyusunan skripsi.
2. Ketua Jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta Program Ilmu Pengetahuan Sosial, yang telah menyetujui atas permohonan penyusunan skripsi.
3. Dra. Sariyatun, M.Pd, M.Hum selaku Ketua Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pengarahan dan izin atas penyusunan skripsi.
4. Dra. Sri Wahyuning, M.Pd selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan petunjuk yang berarti sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
5. Dra. Sariyatun, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah memberikan perhatian dan saran hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Sahabat dan teman-teman Program Studi Sejarah '02 dan semua orang yang telah berpengaruh dalam kehidupanku.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Thanks

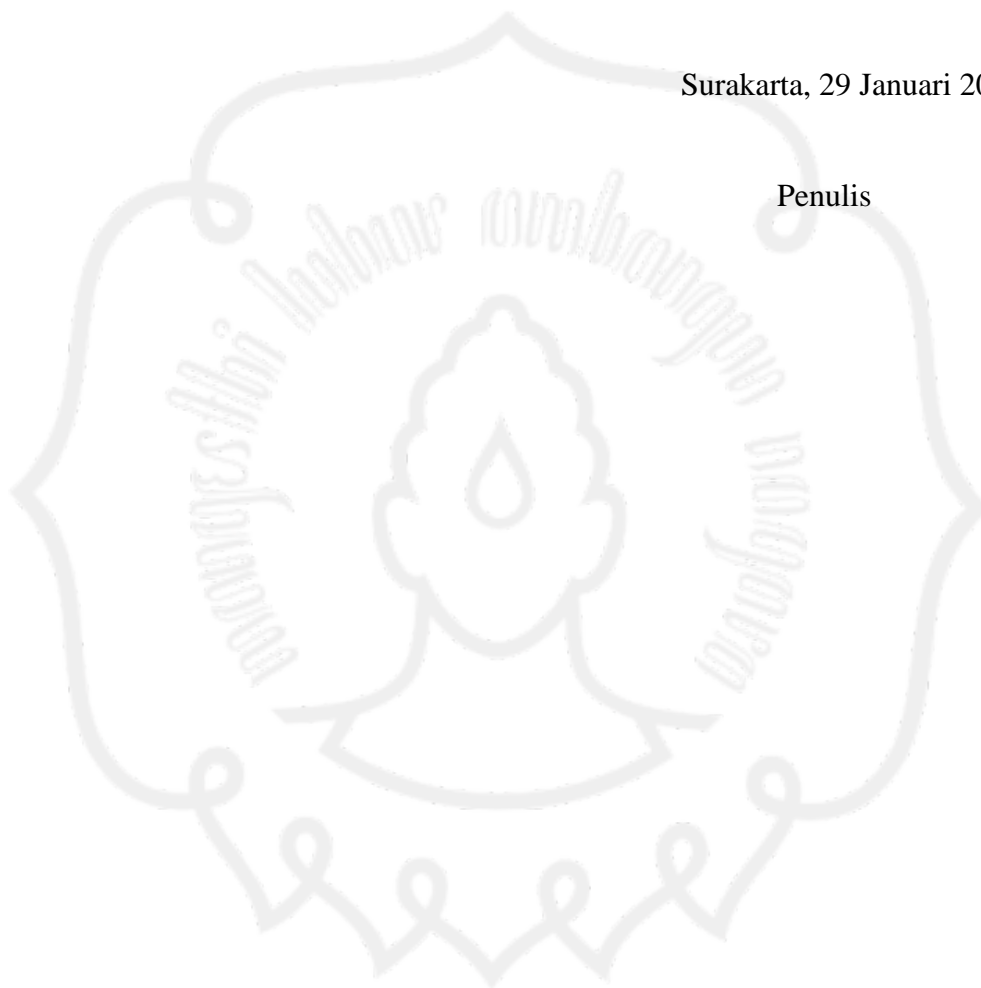
Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih ada kekurangan namun diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Terima kasih

Surakarta, 29 Januari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGAJUAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Kajian Teori	7
1. Organisasi	7
a. Pengertian	7
b. Perkembangan/Pengembangan Organisasi	9
2. Pendidikan	11
a. Pengertian	11
b. Tujuan Pendidikan	13
c. Sistem Pendidikan Pada Masa Penjajahan Hindia Belanda.....	14
3. Gerakan Emansipasi Wanita.....	17
B. Kerangka Berpikir	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	28
B. Metode Penelitian.....	28
C. Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	31
F. Prosedur Penelitian.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Lahirnya Organisasi Wanita Tamansiswa di Yogyakarta.....	36
B. Eksistensi Wanita Tamansiswa dalam Lingkungan Tamansiswa	45
1. Struktur Organisasi	45
2. Tugas dan Kewajiban Organisasi Wanita Tamansiswa.....	55
C. Peranan Organisasi Wanita Tamansiswa Dalam Pengembangan Pendidikan di Yogyakarta	60
1. Kedalam	60
2. Keluar.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi	
1. Implikasi Teoritis	81
2. Implikasi Praktis.....	82
C. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lambang Wanita Tamansiswa	85
Lampiran 2 Panji Wanita Tamansiswa	86
Lampiran 3 Gambar Bendera Wanita Tamansiswa	87
Lampiran 4 Stempel Wanita Tamansiswa	88
Lampiran 5 Struktur Badan Pusat Wanita Tamansiswa	89
Lampiran 6 Struktur Organisasi Wanita Tamansiswa	90

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Wanita merupakan insan yang dianugerahi Allah SWT sifat-sifat halus antara lain ialah sabar, penyayang dan cinta kasih. Wanita juga memegang peranan penting baik dalam fungsi dan tugasnya sebagai pengembang keturunan maupun ibu rumah tangga (Ibnu Ahmad Dahri, 1991:69).

Pada zaman dahulu masyarakat khususnya kaum pria menilai kaum wanita hanya sebagai konco wingking. Anggapan seperti ini harus dihilangkan oleh masyarakat khususnya kaum pria. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kodrat manusia baik pria maupun wanita sudah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, khususnya sifat manusiawi adalah sama dan tidak bertentangan (Abdurrahman Al Baghdadi, 1994:21).

Sebelum R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita telah lahir pahlawan-pahlawan wanita yang berjuang melawan bangsa kolonial Belanda. Maksud kaum wanita tersebut adalah untuk mendampingi para suami di medan perang atau kewajiban seorang istri kepada suaminya. Pada masa itu, kaum wanita berjuang dengan memanggul senjata antara lain ialah Tjut Nya' Dhien, Tjut Meutia, Martha Christina Tiahahu dan R. Ayu Ageng Serang. Perlawanan yang dilakukan kaum wanita tersebut belum bisa dikatakan untuk memajukan kaum wanita. Meskipun demikian, semangat dan cita-cita perjuangan mereka kelak akan melahirkan tunas-tunas bangsa yang berjuang untuk memajukan kaum wanita antara lain ialah R.A. Kartini dan Dewi Sartika.

R.A. Kartini merupakan salah satu tokoh wanita yang berhasil membangunkan kesadaran kemajuan kaum wanita. Kemajuan kaum wanita yang dicita-citakan akan terwujud apabila kaum wanita berusaha sendiri. Kemajuan berarti hilangnya hambatan-hambatan agar mendapat kesempatan mengembangkan jiwanya (Sukanti Suryochondro, 1984:76).

R.A. Kartini dan "Tiga Adara" (R.A. Roekmini, R.A. Kartina, dan R.A. Soemantrie) dari Jepara telah menyebarkan selebaran dengan semboyan "Jawa Maju". Isi selebaran itu adalah ajakan untuk membentuk suatu perkumpulan dan mampu menerbitkan majalah sendiri (Abdurrachman Surjomihardjo, 1980:38). Gagasan-gagasan R.A. Kartini inilah yang mengilhami perjuangan seorang wanita dari Yogyakarta ialah Nyi Hadjar Dewantara. Jadi dapat disimpulkan, R.A. Kartini dan Nyi Hadjar Dewantara merupakan dua insan yang mempunyai semangat dan cita-cita satu ialah untuk meningkatkan harkat, martabat dan derajat kaum wanita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya R.A. Kartini di beri gelar perintis emansipasi wanita (Sudiyo, 1989:12).

Bentuk perjuangan emansipasi wanita antara R.A. Kartini dan Nyi Hadjar Dewantara sama ialah meningkatkan pendidikan bagi kaum wanita khususnya dan masyarakat umumnya. Letak perbedaannya adalah perjuangan R.A. Kartini bersifat perseorangan, belum tumbuh kesadaran kemajuan

didalam diri kaum wanita dan belum terkoordinasi dalam suatu organisasi. Perjuangan Nyi Hadjar Dewantara bersifat kebersamaan, sudah tumbuh kesadaran kemajuan didalam diri kaum wanita dan sudah terkoordinasi dalam suatu organisasi. Perjuangan Nyi Hadjar Dewantara melalui Wanita Taman Siswa yang merupakan bagian dari Taman Siswa. Keberadaan Wanita Taman Siswa oleh Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 (Badan Pusat Wanita Taman Siswa, 1992:5).

Bila kita ikuti perkembangan sejarah perjuangan wanita, bergerak tidak semata-mata untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan peri kehidupan dan untuk menempatkan bagsa Indonesia pada kedaulatan yang memenuhi tuntutan peri kemanusiaan seluruh bangsa untuk itu laki-laki dan wanita bergerak dan berjuang bersama-sama saling membantu. Jadi dalam perjuangan bangsa., wanita menempati kedudukan yang sama disamping laki-laki. Demikian pula wanita Taman Siswa di keluarga Taman Siswa selalu berdampingan demi berhasilnya perjuangan Taman Siswa. Tentu saja baik wanita pada umumnya maupun wanita Taman Siswa pada khususnya berjuang tidak akan menyalahi kodratnya sebagai wanita

Wanita Taman Siswa sebagai organisasi dalam lingkungan keluarga Taman Siswa yang berkedudukan di Yogyakarta mewajibkan dirinya membantu Taman Siswa dalam segala usahanya, khususnya pendidikan kewanitaan. Dengan adanya pendidikan kewanitaan tersebut, maka organisasi Wanita Taman Siswa kemudian kedudukannya disejajarkan dengan Majelis Luhur Tamansiswa. Karena Organisasi Wanita Taman Siswa hidup dalam lingkungan Taman Siswa, maka Wanita Taman Siswa dan juga mengadakan hubungan ke luar dengan dunia pergerakan wanita.

Taman Siswa dalam melaksanakan usahanya dalam bidang pendidikan menggunakan sistem tripusat, yaitu bersatunya perguruan, keluarga murid, dan murid itu sendiri serta dilengkapi dengan prasarana fisik yaitu berupa wisma atau asrama (Majelis Luhur Taman Siswa, 1982:69). Dalam kompleks perguruan tersebut, pamong (guru) wanita Taman Siswa pada sore hari atau pada hari libur memberikan latihan kesenian. Para ibu-ibu

anggota Wanita Taman Siswa pada waktu diluar jam pelajaran sering juga memberi ketrampilan atau melatih anak-anak Wanita Taman Siswa memasak, menjahit, merenda, atau kegiatan kewanitaan lainnya. Dalam kegiatan di Wisma Rini (asrama khusus untuk wanita) ibu-ibu Wanita Taman Siswa memegang peranan penting dalam memberikan pendidikan kewanitaan. Dengan adanya sistem tripusat tersebut, bagi ibu Wanita Taman Siswa yang bukan guru, keluarga merupakan tempat yang paling sesuai untuk menjalankan peranannya, karena keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan utama.

Berdasarkan uraian tersebut dimuka, maka penulis ingin mengangkat topik tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul "PERANAN ORGANISASI WANITA TAMAN SISWA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI YOGYAKARTA (1922-1946)"

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Bagaimana latar belakang lahirnya organisasi Wanita Taman Siswa di Yogyakarta?
2. Bagaimana struktur organisasi Wanita Taman Siswa di Yogyakarta ?
3. Bagaimana Peranan Wanita Taman Siswa dalam pengembangan pendidikan di Yogyakarta?

Tujuan Penelitian

Dalam hubungannya dengan perumusan masalah yang dikemukakan maka dalam penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui secara mendalam latar belakang lahirnya organisasi wanita Taman Siswa di Yogyakarta
2. Mengetahui secara mendalam struktur organisasi wanita Taman Siswa di Yogyakarta

3. Mengetahui secara mendalam peranan wanita Taman Siswa dalam pengembangan pendidikan di Yogyakarta

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai peranan organisasi wanita Taman Siswa dalam pengembangan pendidikan di Yogyakarta
- b. Semakin menghargai peranan kaum wanita Indonesia dalam memajukan kaum wanita khususnya dan masyarakat umumnya.
- c. Berusaha untuk meneruskan perjuangan emansipasi wanita Indonesia pada masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

- a. Wawasan dan pengetahuan penulis mengenai peranan organisasi Wanita Taman Siswa dalam pengembangan pendidikan di Yogyakarta bertambah luas
- b. Skripsi ini merupakan tolok ukur bagi penulis dalam menyusun suatu karya Sejarah.
- c. Melengkapi perbendaharaan karya-karya ilmiah yang sudah ada.



BAB II
KAJIAN TEORITIK

A. KAJIAN TEORI

1. Organisasi

a. Pengertian

Organisasi merupakan bagian atau alat administrasi dalam arti yang luas, tidak hanya menyangkut urusan sekretariat saja melainkan sebagai usaha yang menyeluruh untuk mengatur, memimpin dan menyatukan kepentingan-kepentingan bersama manusia yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Jadi administrasi adalah suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, koordinasi, supervisi dan sebagainya. Sedangkan organisasi adalah tiap bentuk kerjasama atau hubungan antar manusia untuk mencapai tujuan yang sama. Lebih sederhana lagi dapat diberi pembatasan : suatu sistem

kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. (Sutarto,1976:26).

b. Struktur Organisasi

Pada organisasi terdapat struktur, ialah kerangka yang terdiri atas satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat dengan tugas, wewenang serta hubungannya satu sama yang lain yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam lingkungan kesatuan yang utuh (Sutarto,1976:27). Struktur organisasi harus sehat supaya masing-masing yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib struktur organisasi juga harus efisien agar dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasilnya.

c. Jenis Organisasi

Perhatian Ibu-ibu wanita taman siswa pada waktu itu ternyata tidak hanya ditujukan kepada kepentingan keluarga Taman siswa saja, melainkan juga kepada kepentingan Wanita Indonesia pada umumnya. Didorong oleh semangat kartini, yang mempunyai cita-cita meningkatkan derajat dan martabat wanita, salah seorang⁶ wanita Taman Siswa yaitu Nyi Hadjar Dewantara bersama Nyi Sukonto dari Wanita Utomo serta Nona Suryatin dari Puteri Indonesia mengajak organisasi-organisasi wanita yang pada waktu itu telah ada untuk memprakarsai mengadakan kongres perempuan Indonesia I. Akhirnya sebagai organisasi perintis pemrakarsa kongres Perempuan Indonesia adalah :

1) Wanita Utomo, 2) Wanita Taman Siswa, 3) Aisyiah, 4) Wanita Khatholik, 5) Puteri Indonesia, 6) Gong Islamielete Bond Dames Afdeling (Jibda) dan 7) Jong Java Dames Afdeling. Kongres perempuan Indonesia I ini merupakan lembaran sejarah baru bagi pergerakan Wanita Indonesia, yang mewujudkan kerjasama untuk kemajuan wanita khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ciri utama kesatuan pergerakan Wanita Indonesia pada masa itu ialah berdasarkan kebangsaan dan menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia.

Kembali pada wanita Taman siswa yang masih merupakan bagian dalam bentuk tubuh Taman siswa telah bertindak keluar untuk kepentingan wanita Indonesia serta rakyat dan bangsa Indonesia pada umumnya.

d. Tujuan organisasi

Menyadari kodrat wanita sebagai pemangku keturunan organisasi, wanita Taman siswa bertujuan:

1. Membangun anggota menjadi ibu yang melahirkan generasi penerus yang beriman, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudi luhur.
2. Mengembangkan pengaruh keperempuanannya secara optimal dan positif untuk:
 - Mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera
 - Menjaga kesucian dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Taman siswa.
 - Mewujudkan masyarakat adil dan damai dan salam bahagia, sesuai dengan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, UUD Republik Indonesia tahun 1945.
 - Membantu perkembangan generasi penerus di bidang kebudayaan dan peradaban dan seterusnya (Peraturan Besar Bagian Pertama Bab I pasal 16) (Yayasan Penerbitan Taman siswa, 2000:301).

2. Pendidikan

a. Pengertian

Pendidikan merupakan salah satu alat yang penting sebagai strategi untuk mencapai tujuan bangsa dan negara, terutama yang mencerdaskan bangsa. Mengenai pendidikan banyak ahli yang memberikan definisinya. Menurut Siti Merchati (1982 : 35) secara umum adalah segala sesuatu yang turut mengambil bagian dalam membentuk serta mengembang tumbuhkan kepribadian anak, dengan kata lain pendidikan adalah pengalaman yang memberikan pengertian pandangan (insight) dan penyesuaian bagi seseorang

yang menyebabkan ia berkembang. Secara khusus pendidikan berasal dari kata paedagogik. Istilah ini berasal dari kata “paes” yang artinya anak dan “gogos” yang artinya penuntun. Oleh karena itu paedagogik berarti ilmu menuntun anak.

Sedangkan pendidikan menurut Marib yang dikutip oleh Suwarno (1982 :98) adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmanai dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara (1977 : 23), adalah upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti atau kekuatan batin (karakter0. Pikiran (intelekt) dan tubuh anak.”

Pendidikan adalah suatu hal yang amat erat hubungannya dengan sifat kekeluargaan. Oleh sebab itu sifat kekeluargaan selalu dikemukakan dalam pendidikan dan dalam susunan badan pendidikan. Telah kami utarakan lebih dahulu, bahwa oleh karena itu murid menyebut gurunya “bapak” atau “ibu”. Dan menurut sifat kekeluargaan itu pula dalam pekerjaan kita tiadalah perhubungan yang berarti perhubungan majikan dan buruh. Adapun perhubungan dalam pekerjaan yang ada hanyalah pembagian menurut pembawaan atau kecapakan masing-masing.

Dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Dalam menjalankan tugas kita masing-masing, kita selalu tolong menolong, harga menghargai, wengku-winengku. Oleh karena itu pula maka hendaknya dapat ditimbulkan suasana kekeluargaan pada tempat bekerja itu. Dan berhubung dengan itu maka pentinglah artinya bentuk sekolah kita itu. Seperti telah kami cantumkan diatas, sekolah kita adalah juga tempat tinggal guru dan murid. Bentuk perguruan menjadi suatu “pondok” atau “asrama”. Dengan jalan ini tidak lagi rumah sekolah yang nota bene harus merupakan suatu tempat pendidikan, menjadi kosong, mati tak berjiwa, sesudah murid pulang.

Sepanjang hari anak pulang pergi ketempat mereka berguru oleh karena ada daya penariknya. Dalam keadaan ini menguntungkan pekerjaan pendidikan. Dan itu pulalah yang menyebabkan bahwa anak-anak Taman Siswa selalu tergerak rasa kekeluargaan dan kesatuannya, dengan guru-

gurunya bila mereka itu mengingat-ingat perguruannya kembali. Itulah pendidikan yang dapat diselenggarakan untuk mengusahakan agar anak-anak kita jangan terpisah dari orang tua dan lingkungannya, yang bersifat nasional itu. (Wardojo, 1950 : 188)

Dari beberapa pengertian tentang pendidikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha atau kegiatan membimbing atau tuntunan yang diolakukan secara sadar oleh sipendidik terhadap si terdidik untuk mencapai tujuan atau cita-cita, maupun lingkungan sekolah.

b. Lingkungan dan tugas pusat pendidikan

Lingkungan keluarga mempunyai arfi dan pengaruh yang besar bagi pelaksanaan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara sebagai seorang pendidik mengemukakan betapa pentingnya tiga pusat pendidikan adalah alam atau lingkungan keluarga, alam perguruan dan alam pemuda. Masing-masing pusat itu mempunyai tugas sendiri-sendiri tetapi antara tiga pusat tersebut harus ada hubungan rapat. (Darsiti Soeratman, 1981:7). Sudah barang tentu untuk pendewasaan anak didik, sikap dan tenaga si pendidik sangat penting artinya disamping faktor lingkungan atau pusat-pusat pendidik tersebut.

Adapun tugas pusat pendidik itu adalah sebagai berikut :

1. Alam keluarga, pusat pendidikan yang pertama dan yang terpenting, tugasnya mendidik budipekerti dan laku sosial.
2. Alam perguruan, pusat pendidikan yang berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran dan memberi ilmu pengetahuan.
3. Alam pemuda, membantu pendidikan baik yang menuju kepada kecerdasan jiwa maupun budi pekerti. (Darsiti Soeratman, 1981:7)

c. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan menurut langeveld yang dikutip Sudarmono (1979 : 54), adalah pencapaian kedewasaan individu yang meliputi ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Dapat berdiri sendiri dalam hidupnya,

- b) Dapat bertanggung jawab dalam arti susila, dan
- c) Memiliki sifat konstruktif terhadap masyarakat.

Sedangkan tujuan pendidikan menurut UU No. 12 tahun 1954 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat (I Djumbar 1959 : 28). Seiring dengan itu tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN 1983 adalah sebagai berikut : "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, serta mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa."

Pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan Pancasila selain tercantum dalam GBHN, juga disebutkan dalam UU No. 2 1989, tentang tujuan pendidikan nasional yang isinya : "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, kepribadian, berdisiplin, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan Nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu, dikembangkan iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta sama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

d. Pada Masa Penjajahan Hindia Belanda

Pada jaman penjajahan Pemerintah Hindia Belanda membawa suatu jenis pendidikan baru ke Indonesia, yang dalam banyak hal berbeda dari lembaga-

lembaga pendidikan pribumi. Perbedaan –perbedaan yang pokok adalah sebagai berikut;

- a. Pendidikan yang dibiayai oleh Belanda di sekolah-sekolah umum netral terhadap agama
- b. Tidak memikirkan caranya hidup secara harmonis dalam dunia, tetapi menekankan tentang bagaimana memperoleh penghidupan.
- c. Diselenggarakan berdasarkan perbedaan kelompok anti di dalam masyarakat
- d. Diselenggarakan untuk mempertahankan perbedaan kelas di dalam masyarakat
- e. Sebagia besar diarahkan pada pembentukan elite masyarakat yang bisa dipergunakan untuk mempertahankan supremasi politik dan ekonominya di negeri jajahannya (Selo Sumardjan, 1981:278).

Sejalan dengan keragaman kelompok yang ada dalam memasyarakat, didirikan sekolah-sekolah dasar yang terpisah untuk orang Indonesia, Belanda, Cina, dan orang Arab. Pelajaran diberikan dalam bahasa Belanda, kecuali sekolah –sekolah menengah Belanda jika orang tua mereka terpendang dan termasuk dalam kelas atas,serta mempunyai perilaku yang sama dengan orang Belanda, kalau tidak, mereka tidak dapat melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh Belanda tersebut, netral terhadap agama (Selo Sumardjan, 1981:281).

Sebetulnya system sekolah untuk penduduk pribumi bukan dimaksudkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat, melainkan sebagai sarana yang terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Pemerintah Hidia Belanda membutuhkan pegawai untuk memenuhi kebutuhan kantor-kantor pemerintah, kualitas pendidikan lebih banyak dikaitkan dengan pekerjaan kantor dan bukan dengan ketrampilan praktis yang bisa digunakan dalam kehidupan rakyat sehari-hari masyarakat Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, anak-anak wanita yang mendapat kesempatan belajar itu sedikit sekali, oleh karena itu organisasi wanita taman siswa bersama-sama dengan organisasi wanita lainnya memberikan kursus-kursus kepandaian putri untuk gadis-gadis pribumi, seperti menjahit, membatik,

perawatan kesehatan dan lain sebagainya. Wanita perlu diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yaitu untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan yang ada di dalam masyarakat pada waktu itu, misalnya adanya system poligami. Perkawinan anak-anak, kawin paksa dan lain sebagainya. Dengan pendidikan mereka dapat memperoleh penghidupan yang lebih baik (Maria ulfah & TO Ihromi,1986:93).

3. Gerakan Emansipasi Wanita

Gerakan emansipasi wanita yang pernah melanda benua Eropa dia akhiri abad XIX sampai dengan awal abad XX, telah menggema diberbagai penjuru dunia dan berkembang pula sampai dibumi Indonesia.

Namun sebelumnya kita ketahui dahulu pengertian emansipasi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia emansipasi berarti bebas dari rintangan bebas dari pengaruh, bebas dari keterkaitan. Kebebasan yang ada kaitnanya dengan perbudakan. Ikatan-ikatan dapat, kebiasaan dan tradisi serta persamaan hal dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (seperti persamaan hak kaum wanita dengan pria, persamaan hak dalam hukum) (W.JS. Poerwadarminta.1986)

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa “emasipasi” dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu tindasan. Pembebasan dari suatu ketergantuangn. Selama ini bukan berarti wanita tidak membutuhkan seorang laki-laki tetapi menginginkan persamaan hak yang selama tradisi lama menganggap bahwa wanita adalah makhluk yang lemah. Persamaan-persamaan pria dengan wanita tentu persamaan dalam bidang-bidang tertentu, tidak semua hal. Ada ketentuan kodratti di mana wanita bisa ini dan pria bisa itu, sebaliknya wanita bisa itu dan pria tak bisa ini. Hal ini menunjukkan antara pria dan wanita dapat saling membantu dalam berbuat kebaikan.

Keadaan wanita yang ditindas oleh pihak laki-laki niscaya akan membangkitkan suatu pergerakan yang berusaha menindakan segala tindakan itu. Hal itu memang sudah hukum alam, tetapi adalah hukum alam juga bahwa kesadaran juga kegiatan suatu pergerakan itu terhadap, demikian juga pergerakan emansipasi wanita. Oleh karena itu, untuk mengetahui tahap-tahap tersebut perlu

mengetahui pergerakan wanita di dunia barat. Karena di dunia barat sudah sadar, sudah mengadakan pergerakan. Sedangkan wanita di timur (Asia) masih saja diam menderita pingitan dan penindasan dengan tidak melakukan protes sedikitpun. Mereka tidak mengetahui bahwa ada jalan untuk memerdekakan diri dari pingitan dan penindasan. Wanita-wanita timur mengira bahwa alam. Lambat laun pergerakan wanita di dunia barat akhirnya sampai di timur juga (Soekarno, 1947:150)

Soekarno (1947) merumuskan perjuangan kaum perempuan di Eropa pada abad ke-18 melalui 3 tahap yaitu :

Tahap pertama yaitu berupa pertemuan antar kawan-kawan. Sebenarnya tahap pertama ini kurang tepat dikatakan pergerakan wanita. Karena hanya bersifat pertemuan saja. Bukan suatu aksi atau perlawanan terencana. Tujuannya hanya untuk mengisi waktu luang, yaitu membicarakan tentang kerumah tangganya untuk menyempurnakan wanita sebagai istri dan ibu, misalnya menjahit, memasak dan sebagainya. Hal itu terutama dilakukan oleh wanita-wanita bangsawan.

Tahap kedua adalah pergerakan feminisme tahap ini bukan lagi untuk menyempurnakan wanita sebagai ibu atau istri. Akan tetapi lebih meningkatkan yaitu dengan sadar wanita menuntut persamaan hak dan derajat dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki. Kaum wanita sadar bahwa hampir dalam segala bidang wanita tidak diberi kesempatan dan hanya dipegang oleh kaum laki-laki. Gerakan feminisme ini. Juga disebut emansipasi wanita dan aksinya menuntut kepada laki-laki.

Tahap ketiga adalah pergerakan sosialisme terutama perempuan kelas bawah (kaum pekerja) yang menghendaki perubahan susunan masyarakat berkelas yang menindas mereka. Dimana wanita dan laki-laki bersama-sama berjuang untuk mewujudkan masyarakat sosialis kaum wanita dan laki-laki sama-sama sejahtera dan merdeka.

Di dunia barat terdapat gerakan feminisme yang tujuannya adalah menyadarkan kaum wanita akan hak-haknya dan mereka harus menuntut hak-hak tersebut kepada kaum laki-laki. Dengan demikian, perjuangan wanita Barat yang menuntut emansipasi, dilakukan dengan cara menghadapi laki-laki. Feminisme

yang timbul di dunia barat tidak menjauhkan diri dari kekerasan. Sungguhpun ada golongan-golongan yang mencari jalan kearah keadilan lewat perundang-undangan atau cara lain yang tidak mencolok. Akan tetapi ada aliran yang tidak segan-segan menempuh jalan kekerasan atau cara kasar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Misalnya Emily dari London melemparkan didi di muka kuda kepunyaan raja, pengeorbanan itu dimaksudkan supaya menjadi cambuk bagi yang lain untuk meneruskan perjuangannya sampai diperoleh hak milik wanita (Sukanti Suryochondro, 1984:109)

Gerakan emansipasi wanita di dunia barat dan di Negara-negara lain, pada dasarnya sama-sama mencari keadilan berdasarkan perkemansusiaan.

Pendapat dari Seokarno tersebut dapat diperjelas lagi oleh Marshal (1983) yang meneliti status dan peranan wanita Skotlandian sejak abad XI sampai abad XX, yang membagi wanita menjadi 2 katagori, yaitu : periode wanita pasif dan periode wanita aktif (Darsiti Suratman, 1992:6) pembagian Mashal ini dapat diterapkan di Negara-negara berkembang. Periode wanita pasif, dimana kehidupan wanita terpancang di sekitar kehidupan rumah tangga. Tujuan wanita seakan-akan hanya untuk menikah dan membangun rumah tangga, oleh karena itu anak gadis tidak sempat mempunyai cita-cita. Mereka tidak mengenal masa remaja karena sesudah berumur 12 tahun mereka telah berumah tangga. Sedangkan periode wanita aktif, dimana wanita sudah aktif dalam segala bidang kehidupan. Mereka tidak lagi hanya bekerja di dalam rumah tangga melainkan juga sudah bekerja di pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Pada pokoknya kaum wanita tidak tinggal diam selalu aktif dalam kegiatan.

Sudah selayaknya bahwa kemajuan dan dorongan untuk memajukan wanita berasal dari kaum wanita sendiri. Mereka tidak lagi merasa puas dengan cara hidup yang terbatas yang diisi dengan kewajiban-kewajiban untuk keluarga dan rumah tangga saja.mereka ingin memperoleh kebebasan dan bekerja di lingkungan yang lebih luas. Mereka merasa tertindas dna belum memiliki hak dan kesempatan yang sama tertindas dan belum memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti kaum laki-laki. Memang membela jenisnya sendiri, merupakan

kekuatan yang menentukan sikap manusia: kadang-kadang secara sadar dan kadang-kadang tidak sadar (Nani Suwondo:1981:40).

Tujuan gerakan emansipasi wanita adalah agar wanita dapat hidup mandiri, menggunakan hak-hak seperti halnya yang berlaku pada kaum laki-laki, sehingga mereka tidak lagi mengandung sebutan warga Negara kelas dua (Darsisti Suratman.1992:10)

Gerakan emansipasi wanita di Indonesia, orientasinya menekan pada tingkatan kecerdasan individu yang diperoleh dari pendidikan dan penjajahan. Sasaran yang lebih jauh dari emansipasi wanita adalah mempertinggi harkat dan martabat kaum wanita.

Di dalam gerakan emansipasi wanita terdapat nilai-nilai pokok yang mendasarinya, yaitu :

- a. Nilai Perikemunusiaan
- b. Nilai keadilan, yang menentang bermacam-macam kepincangan-kepincangan yang ada didalam masyarakat kolonial, begitu pula hambatan-hambatan yang ada bagi kaum wanita di dalam masyarakat.
- c. Nasionalise yang menentang perbuatan-perbuatan penjajah yang menyebabkan penderitaan orang banyak (Sukanti Suryochondro.1984).

Oleh karena itu tujuan pergerakan kaum wanita Indonesia bukan hanya untuk kepentingan kaum wanita saja, melainkan mempunyai tujuan yang lebih jauh. Tujuannya adalah untuk membebaskan kaum wanita dari segala macam penindasan dan ikut aktif menyebabkan penderitaan seluruh rakyat.

Menurut Maria Ulfah Subadio (1978), di dalam masyarakat terlihat 4 golongan wanita yaitu :

1. Ada wanita yang mempunyai bakat dan cita-cita luhur sehingga ia memberikan seluruh pengabdianya ia memilih untuk berumah tangga.
2. Ada wanita yang sudah merasa bahagia dengan memberikan pengabdianya kepada keluarga, jadi seratus persen menjadi ibu rumah tangga.
3. Ada wanita-wanita yang cakap yang mungkin juga karena ambisinya rela memberikan prioritasnya kepada pekerjaannya diatas keluarganya.

4. Ada wanita yang memilih jalan tengah karena ia bekerja maka menerima peranan rangkapnya dengan mencoba mengadakan kombinasi sebaik-baiknya.

Dari pendapat Maria Ulfah tersebut dapat dikatakan bahwa wanita pada masa sekarang ini banyak menerima peran gandanya tersebut. Walaupun mereka bekerja dan banyak kegiatannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, namun tidak boleh mengabdikan kewajibannya sebagai ibu, mereka harus pandai membagi waktu.

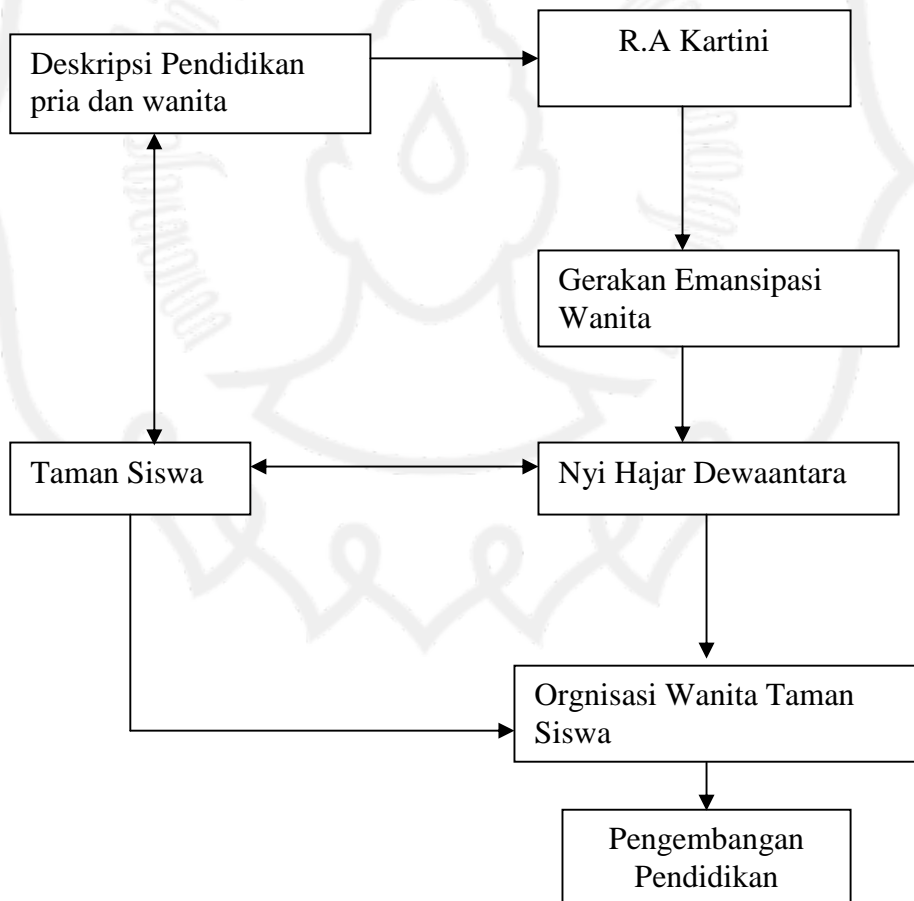
Hal itu juga dikemukakan oleh Soedjatmoko (1973:3) yang menyatakan bahwa:

Karena kesadaran diri dan tingkat emansipasi wanita Indonesia yang sudah cukup itu, maka wanita-wanita Indonesia tidak menggapa dirinya hanya sebagai unsur perjuangan bangsa Indonesia yang sama kemampuannya dan kewajibannya tidak terbatas pada lingkup usaha suaminya.

Jadi emansipasi yang dikendaki kaum wanita bukan hanya semata-mata hanya sekedar menuntut persamaan hak antar kaum wanita dan laki-laki, tetapi emansipasi yang wajar adalah suatu cita-cita persamaan hak dan kewajiban serta tentu saja kesemuanya yaitu mengingat sifat dan hakekatnya daripada subyek masing-masing. Pergerakan emansipasi wanita selalu konsisten. Perbedaan hanya diwarnai oleh perbedaan strategu. Saat-saat menjelang akhir penjajahan Belanda, strategi perjuangan wanita adalah meningkatkan harkat dan martabat wanita untuk mencapai Indonesia merdeka.

Gerakan emansipasi wanita di Indonesia, orientasinya menekankan pada tingkat kecerdasan individu, yang diperoleh dari pendidikan dan pengajaran. Sasaran yang lebih jauh emansipasi wanita adalah mempertinggi harkat dan martabat kaum wanita, sehingga sejajar dengan laki-laki, misalnya tentang hak pilih. Gerakan emansipasi wanita Indonesia dapat dinamakan gerakan pembesana kaum wanita dari ketergantungan kepada orang lain persamaan hak,

B. Kerangka Berpikir



Keterangan

Pada jaman penjajahan Belanda masyarakat memandang kedudukan wanita lebih rendah dari pria masyarakat menganggap makhluk kelas dua segala-segalanya dibawah kaum pria. Wanita Indonesia dipandang tugas utamanya dalam rumah tangga maka mereka dapat saja diabaikan dalam program-program pembangunan yang tidak menyangkut kesejahteraan keluarga. Karena wanita Indonesia tugas utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga maka apabila mereka harus bekerja majikan mereka akan memberikan upah rendah dari pada pekerja pria.

Maka wanita-wanita terpelajar pada waktu itu seperti R.A Karitini dan Nyi Hajar Dewantara tidak dapat menerima anggapan semacam itu. R.A Kartini dan Nyi Hajar Dewantara berusaha mengubah pandangan dan anggapan masyarakat itu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa wanita pada hakikatnya sama martabat dan derajatnya dengan kaum pria.

Kemudian muncul adanya gerakan emansipasi wanita Indonesia, yang orientasinya ditekankan pada tingkatan kecerdasan secara individu yaitu dengan melalui pendidikan. Sasaran yang lebih jauh yang ingin dicapai adalah mengangkat harkat dan martabat kaumnya, sehingga sejajar dengan kaum laki-laki

Pada masa Hindia Belanda pendidikan bagi pribumi hanya bisa dinikmati kalangan priyayi. Maka itu timbul sekolah-sekolah untuk kaum pribumi. Seperti Taman Siswa (Ki Hajar Dewantara)

Melihat hal tersebut Nyi Hajar Dewantara yang mengambil bagian untuk memperbaiki bagi kaum wanita dan mendirikan organisasi wanita Taman Siswa yang merupakan kehidupan bagian dari taman siswa, kemudian organisasi Taman Siswa berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan bagi wanita. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh Taman Siswa tidak jauh beda dengan yang diberikan oleh R.A Kartini antara lain ialah membaca, menulis, menjahit, merenda memasak etika dan sebagainya

Adapun kegiatan lainnya terutama dalam usaha meningkatkan kualitas anggota wanita Taman Siswa mengadakan lomba mengarang diskusi pelatihan

dan penataran. Kegiatan itu selain bermaksud menambah ilmu pengetahuan juga melatih ketrampilannya dalam bermusyawarah, mendorong gemar membaca, serta membangkitkan kepeduliannya terhadap masalah-masalah social khususnya yang terjadi kalangan Taman Siswa maupun diluar organisasi luar Taman Siswa secara luas.

Usaha-usaha pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh wanita taman siswa untuk melaksanakan pendidikan wanita seperti mengadakan pembinaan pendidikan kewanitaan kepada siswa-siswa putri di Taman Siswa yang meliputi pendidikan kesusilaan, keluhuran budi, latihan latihan ketrampilan kewanitaan, misalnya ketrampilan mengurus rumah tangga, pembinaan pendidikan dan latihan ketrampilan kewanitaan kepada anggota atau keluarga Taman Siswa, yang meliputi hal-hal yang diperlukan untuk bekal memantapkan pelaksanaan peranan ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga misalnya dalam usaha membina usaha keluarga yang horamonis, dan meliputi hal-hal yang diperlukan untuk terjun dalam masyarakat, yaitu bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Ibu-ibu anggota atau keluarga Taman Siswa perlu melengkapi pengetahuan tentang pendidikan mental dan macam-macam ketrampilan, yang kemudian diteruskan kepada anak-anak putri atau dewasa didalam Taman Siswa maupun diluar taman siswa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil judul “Peranan Organisasi Wanita Taman Siswa dalam pengembangan pendidikan di Yogyakarta tahun 1922-1946”, dengan teknis pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan.

Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
2. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
3. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret
4. Perpustakaan Monumen Pers Nasional Surakarta
5. Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta
6. Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan adalah mulai dari disetujuinya judul pada bulan September 2005 dan sampai bulan Februari 2007.

B. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu metode ilmiah tertentu, yaitu cara untuk memecah masalah-masalah yang dihadapi di dalam penelitian. Sedangkan metode merupakan cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dengan mempergunakan teknik tertentu.

Di dalam penelitian ini, penulis ini menggunakan metode historis. Adapun yang dimaksud dengan metode historis yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis peristiwa masa lampau, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan memverifikasikan²¹ bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Nugroho Notosusanto, 1975:32).

C. Sumber Data

Penulisan skripsi ini berdasarkan sumber-sumber sejarah yang telah dihimpun oleh penulis. Sumber yang baik ialah yang mengandung kenyataan sejarah atau kenyataan masa lalu dan menjelma dalam bentuk fakta (Sidi Gazalba, 1981:33). Menurut F.J Teggart bahwa fakta adalah hasil dari penyelidikan kritis, pernyataan-pernyataan ditarik dari bahan-bahan dokumenter dan pernyataan ini yang disebut fakta sejarah (Sidi Gazalba, 1981:33). Oleh karena itu, sumber-sumber merupakan pangkal tolak dari rekonstruksi yang akan dibangun atau sumber-sumber sejarah merupakan modal rekonstruksi sejarah (Sartono Kartodirdjo, 1982:83).

Sumber-sumber sejarah yang digunakan oleh penulis adalah jejak peristiwa yang memuat informasi tertulis, antara lain ialah karya tulis dari seorang pelaku atau saksi suatu peristiwa sejarah dan karya tulis dari seseorang yang tidak hadir pada suatu peristiwa sejarah yang dikisahnya serta sumber-sumber sejarah yang berupa oral history atau sejarah lisan. Menurut klasifikasinya, sumber-sumber sejarah dibedakan menjadi tiga

klasifikasi ialah sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier (Nugroho Notosusanto, 1978:37). Tujuannya untuk mempermudah pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah secara otentisitas dan kredibilitas. Penulisan skripsi ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri, saksi dengan panca indera atau dengan mekanis misalnya orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (Louis Gottschalk, 1975:35). Penulis menggunakan sumber-sumber primer, antara lain ialah buku-buku, dokumen dan foto-foto. Selain sumber-sumber primer tersebut, penulis juga melakukan wawancara (Kuntowijoyo, 1994:21). Sumber-sumber primer yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut.

1. Ki Hajar Dewantara, *Azaz-azaz dan Dasar-dasar Tamansiswa*, Madjelis Luhur Tamansiswa, Jogjakarta, 1964. Buku ini berisi mengenai Azaz-azaz Tamansiswa maupun Wanita Tamansiswa, Adat-istiadat Tamansiswa dan Semboyan-semboyan Tamansiswa. Tujuan Tamansiswa maupun Wanita Tamansiswa adalah untuk menciptakan masyarakat tertib damai.
2. Kowani, *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 22 Desember 1928-22 Desember 1958*, Pertjetakan Negara, Jakarta, 1958. Buku ini merupakan kumpulan karya tulis mengenai pergerakan wanita Indonesia. Salah satu organisasi wanita yang menjadi anggota badan Kongres Wanita Indonesia ialah Wanita Tamansiswa. Tujuan Wanita Tamansiswa dan organisasi wanita Indonesia adalah sama, untuk memajukan kaum wanita khususnya dan masyarakat umumnya.
3. Buku Peringatan Tamansiswa (ed) *Tamansiswa 30 Tahun 1922-1952*, Pertjetakan Tamansiswa, Jogjakarta, 1956. Buku ini merupakan kumpulan karya tulis mengenai pergerakan Tamansiswa termasuk Wanita Tamansiswa, sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan nasional. Usaha-usaha yang dilakukan Tamansiswa maupun Wanita Tamansiswa

adalah mengembangkan dan memajukan Tamansiswa sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan nasional bagi bangsa Indonesia, sejak zaman penjajahan Belanda sampai Indonesia merdeka.

Sumber primer yang lain ialah hasil wawancara dengan para tokoh Wanita Tamansiswa yang ikut serta memajukan kaum wanita khususnya dan masyarakat umumnya, baik di dalam lingkungan Tamansiswa maupun di luar lingkungan Tamansiswa. Tujuan pencarian dan pengumpulan sumber primer ini adalah untuk membantu kekurangan sumber-sumber sejarah dan untuk mengisi atau melengkapi celah-celah dari sumber-sumber tertulis (Kuntowijoyo, 1994:22).

Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata atau seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya (Louis Gottschalk, 1975:35). Sumber-sumber sekunder yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut :

1. T.O Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995. Buku ini berisi mengenai lahirnya organisasi wanita Indonesia lebih kurang pada awal abad ke 20. Tujuan organisasi wanita Indonesia ialah untuk membuka hati nurani kaum wanita khususnya dan masyarakat umumnya mengenai makna kemajuan bagi suatu bangsa.
2. Fauzie Ridjal dll, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1993. Buku ini membahas perjalanan perjuangan kaum wanita Indonesia, sebelum R.A Kartini sampai lahirnya organisasi wanita Indonesia. Tujuan perjuangan kaum wanita Indonesia adalah untuk memajukan kaum wanita khususnya dan masyarakat umumnya.
3. Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, C Rajawali, Jakarta, 1984. Buku ini membahas perjuangan emansipasi wanita Indonesia yang berwujud gerakan sosial.

Tujuan perjuangan emansipasi wanita Indonesia ialah untuk meningkatkan harkat, martabat dan derajat kaum wanita khususnya dan masyarakat umumnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penting dalam penelitian. Pengumpulan data memerlukan suatu keahlian yang cukup untuk melakukannya. Benar salahnya pengumpulan data tergantung dari sumber data yang dipakai dan teknik pengumpulannya. Karena penelitian ini menggunakan sumber data tertulis, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan, antara lain berupa buku-buku, majalah, dan sebagainya. Adapun teknik pelaksanaannya adalah dengan mengadakan kunjungan keperpustakaan-perpustakaan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan membaca buku-buku literatur, majalah, laporan karya ilmiah dan bentuk pustaka yang lain. Hasil dari membaca tersebut kemudian diringkas dan ditulis kembali dalam bentuk catatan-catatan kecil.

Setiap menulis catatan kecil ditulis juga tanggal, konsep, teori dan data lain yang diperlukan dalam penelitian. Catatan seperti itu dimulai segera setelah data pertama yang dibutuhkan muncul dan terus berlanjut hingga laporan penelitian berakhir. Dengan adanya catatan kecil akan mempermudah penulis dalam mencari data hingga membuat laporan. Catatan kecil yang masih berupa data yang banyak, agar mempermudah jalannya pengumpulan data, maka perlu diadakan sistem pengkodean, yaitu suatu cara mempermudah pengumpulan data dengan memberi kode pada catatan-catatan hasil membaca, mengkaji buku-buku dan bentuk pustaka lain. Kode itu berupa singkatan atau simbol yang diterapkan pada sekelompok kata, paragraf atau kalimat yang dikembangkan dari permasalahan, konsep, teori dan tema dari data yang ditulis.

Dengan teknik seperti itu akan diperoleh teori, konsep dan data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian dengan lebih mudah dan efektif. Data yang sudah dikumpulkan dijadikan bahan untuk menyusun cerita sejarah.

E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini terdiri dari bermacam-macam buku dan juga dari hasil wawancara. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan data-data yang bersifat kualitatif dan monografis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati (Louis Gottshalk, 1975). Data-data yang terkumpul dianalisis berdasarkan sebab akibat dari suatu masalah atau fenomena historis dalam cakupan-waktu dan tempat. Selanjutnya diadakan penafsiran terhadap hubungan antar fenomena yang terjadi. Berdasarkan analisis dan penafsiran tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penulisan sejarah untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, sehingga menjadi cerita sejarah yang bersifat deskriptif.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian adalah langkah-langkah penelitian dari awal sampai dengan penulisan laporan penelitian, karena dalam penelitian ini menggunakan metode historis, adapun yang dimaksud dengan metode historis yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis peristiwa masa lampau, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan memverifikasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Nugroho Notosusanto, 1975 : 32).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis adalah sebagai berikut :

1. Heuristik, yaitu kegiatan untuk menghimpun data yang berasal dari sumber-sumber sejarah masa lampau serta pengumpulan sumber yang

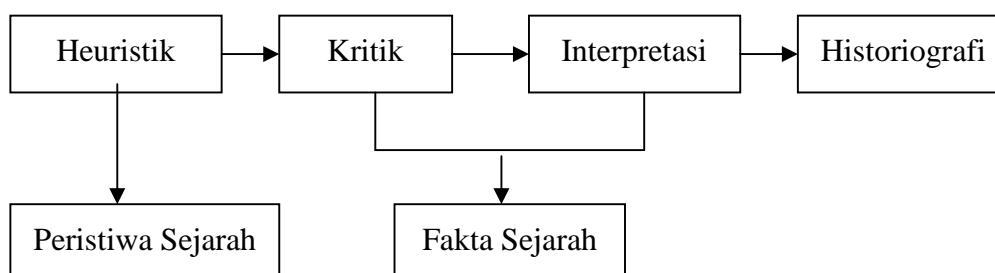
berbentuk tulisan dan hasil dari wawancara. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber prime dan sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka dan wawancara

2. Kritik sumber, kegiatan untuk menyeleksi dan memilih data yang valid yaitu untuk menilai dan menyelidiki apakah data dari kejadian masa lampau yang sudah terkumpul tersebut sejati atau tidak yaitu dengan cara menyingkirkan bagian yang tidak otentik. Kegiatan kritik ini meliputi :
 - a. Kritik ekstern, yaitu kegiatan untuk meneliti tingkat kevaliditasan data yang diperoleh
 - b. Kritik intern, yaitu kegiatan untuk meneliti apakah data yang diperoleh itu akurat atau tidak

Agar tingkat keobyektivitasan penulisan ini terpenuhi, maka setelah data terkumpul kemudian dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Perbandingan tersebut akan memperlengkapi atau mengontrol kebenaran suatu data

3. Interpretasi, yaitu kegiatan untuk menyeleksi data yang relevan dengan penelitian, setelah itu dianalisis dan diberi arti. Hasil analisis diadakan pengkajian kembali, didiskusikan sehingga dapat ditetapkan makna saling hubungan data yang diperoleh.
4. Historiografi, setelah semua data yang telah diinterpretasikan dan dievaluasi, selanjutnya dilakukann analisa data dan penafsiran terhadap hubungan antar data yang telah terpilih, sehingga diperoleh fakta-fakta sejarah yang merupakan data sejarah yang akurat. Berdasarkan sejarah yang akurat tersebut kemudian disajikan dalam bentuk cerita sejarah sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang bermakna (Nugroho Notosusanto, 1964:23).

Prosedur penelitian itu dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB II

PEMBAHASAN

A. Kondisi Politik Indonesia Menjelang Pemberontakan PKI Tahun 1948 di Madiun

1. Akibat Politis dari Perjanjian Renville

Perkembangan dan perubahan – perubahan politik pemerintah Indonesia dimulai dengan keluarnya keputusan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) I tanggal 16 Oktober 1945 yang meminta agar KNIP diberi hak legislative dengan melakukan tugas MPR dan DPR sebelum lembaga itu terbentuk. Berdasarkan usul KNIP, dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945 itu juga. Dengan keluarnya maklumat tersebut, maka secara politis berubahlah sistem politik Indonesia menjadi sistem presidential menjadi sstem parlementer (Yahya Muhaimin, 1983 : 40). Dengan demikian para menteri yang dulunya diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada presiden, dengan system parlementer berubah kepada perdana menteri. Maklumat tersebut berarti juga kemenangan bagi Partai Sosialis yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Syahrir yang berusaha membawa pemerintahan ke arah liberalisme dengan mewujudkan pemerintah yang parlementer.

Pada tanggal 3 November 1945 atas desakan KNIP pula pemerintah melalui Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang berisi pendirian partai politik untuk menyambut pemilihan umum anggota Badan – Badan Perwakilan Rakyat yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946 (*Prisma*, 12 Desember 1981 : 10). Pendirian partai-partai politik tersebut bertujuan untuk memperkuat perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, namun kenyataannya dalam praktek politik merupakan acaman terhadap kestabilan negara.

Dengan banyaknya jumlah partai-partai politik, secara luas mengakibatkan pula banyaknya perbedaan ideologi antara satu partai dengan partai lainnya. Hal tersebut menimbulkan perpecahan di dalam kekuatan politik yang ada. Kenyataan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya usaha Syahrir dengan kelompok persekutuannya sipil-militer dan kelompok lain (Mr. Achinad Subardjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, disertai Mayor Jenderal Sudarsono) yang mencoba memaksa Presiden agar menandatangani konsep susunan pemerintahan baru. Konsep tersebut dikemukakan pada tanggal 3 Juli 1946 yang kemudian terkenal dengan “Peristiwa 3 Juli 1946” (Ricklefs, 1989 336). Konsep tersebut berisi

1. Pemberhentian seluruh kementerian negara Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin oleh Presiden.
2. Pengerahan kekuasaan rakyat yang berkenaan dengan pembelaan dan pengawasan negara kepada Panglima Besar Angkatan Darat, Laut, dan Udara dan yang berkenaan dengan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik yang keanggotaannya akan segera diumumkan.

(Ben Anderson, 1988 433 — 434).

Meskipun peristiwa tersebut dapat diselesaikan, akan tetapi pergulatan politik. Indonesia akan terus berlangsung selama sistem politik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 ini ditinggalkan.

Memasuki akhir tahun 1946, dengan adanya pro (Sutan Syahrir dan kelompoknya) dan kontra (Amir Syarifuddin dan kelompoknya) pada perundingan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 15 November 1946, Sutan Syahrir menyatakan harapannya agar naskah persetujuan dapat diterima, sehingga dapat menggunakan tenaga 75 juta rakyat dengan lebih rasional. Beberapa partai politik menyatakan menentang, seperti PNI dan Masyumi. Pertentangan ini terjadi karena didalam tubuh Partai Sosialis sendiri terdapat dominasi kepemimpinan yang berbeda. Pada kutub yang satu nampak condong pada kepemimpinan Sutan Syahrir, sedangkan pada kutub yang lain nampak mendukung kepemimpinan Amir Syarifuddin. Keretakan pun terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Amir Syarifuddin dengan Sutan Syahrir.

Amir Syarifuddin lebih banyak melihat kepemimpinan Moskow yang pada saat itu menyatakan bahwa kemerdekaan negara-negara yang dijajah tidak akan pernah diperoleh sebelum Amerika Serikat dan Sekutu tunduk kepada Uni

Sovyet. Sementara itu, Sutan Syahrir berpendapat bahwa Indonesia jangan terlihat dalam pertentangan antara dua negara adikuasa agar tercipta perdamaian dunia. Sutan Syahrir menyatakan harapannya agar naskah Persetujuan Linggarjati tersebut dapat diterima dengan menyatakan bahwa naskah hanyalah sekedar alat untuk mencari jalan baru bagi perjuangan Indonesia di masa mendatang dan sebagai batu loncatan guna mencapai tujuan yaitu memperbaiki kedudukan politik. Sutan Syahrir mendapat dukungan dari Partai Buruh, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Pesindo, Laskar Rakyat serta Barisan Tani Indonesia. Namun demikian, perjanjian tersebut ditolak oleh partai lain seperti PNT, Masyumi, Partai Rakyat Indonesia dan Partai Rakyat Jelata karena dianggap kedaulatan negara telah berkurang dan Indonesia nantinya akan berada di bawah dominasi kekuasaan asing (Mc. Vey, 1957: 66).

Kabinet Syahrir akhirnya bubar karena pertentangannya secara intern antara ia dengan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Sutan Syahrir rupanya mulai mencurigai orang-orang komunis yang diselundupkan ke Partai Sosialis Indonesia (PSI). Amir Syarifuddin selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan berusaha memasukkan paham komunis ke dalam tubuh Angkatan Perang melalui pendidikan perwira Politik (Pepolit). Amir Syarifuddin juga berhasil mengkoordinir tenaga-tenaga dan luar TNI ke dalam TNI Masyarakat yang kemudian menjadi modal kekuatan dalam pemberontakan PKI Muso di Madiun. Ia menyalurkan sebagian besar anggaran belanja pertahanan TNI Masyarakat (Pesindo dan organisasi para militer lainnya dan partai dan masyarakat) (Jvfinggu Pagi, 7 Agustus 1947). Seperti diketahui bahwa selama kabinet Amir Syarifuddin menggantikan kabinet Syahrir, 2/3 dan anggaran belanja militer disediakan untuk laskar-laskar dan hanya 1/3 untuk tentara resmi. Konsep rasionalisasi militer Amir Syarifuddin yang mendasarkan inti dan tentara seharusnya : TNI Masyarakat dengan Pesindo dalam kedudukan kuat dan TNI resmi meleburkan diri ke

dalamnya, Di dalam melahirkan perwira-perwira populis, tentara akan diindroktinir dengan doktrin-doktrin revolusi. Konsepsi mi jelas meminjam dan tentara Rusia. (Revo/usioner, 16-20 Agustus 1946)

Aksi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 dengan sasaran daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra, membawa dampak politis yang sangat hebat baik di dalam maupun luar negeri. Dalam waktu singkat Belanda berhasil menerobos pertahanan TNI. Aksi militer tersebut mendapat sorotan tajam dan dunia internasional, khususnya Australia, Polandia, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dewan Keamanan PBB turun tangan dan memutuskan kepada Amir Sjarifuddin agar melakukan gencatan senjata, dan kepada pihak Belanda, Dewan Keamanan PBB meminta agar mundur dan batas-batas sebelum dilakukannya Aksi Militer tersebut.

Pada tanggal 4 Agustus 1947 Presiden Soekarno menyatakan kesediaan pihak Republik Indonesia untuk melakukan gencatan senjata dalam pidato singkatnya yang berbunyi

Dunia telah menghukum agresor Belanda. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan suaranya dan menganjurkan agar permusuhan yang dimulai oleh Belanda itu dihentikan. Anjuran yang demikian mi disampaikan pula kepada pihak Republik Indonesia. mi berarti, kita telah membuktikan dapat meladeni Belanda dan menghantam Belanda dalam pertempuran yang sengit melawan tentara kolonialnya. Oleh sebab itu saya memerintahkan kepada seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia dan rakyat yang berjuang di samping angkatan perang kita, mulai saat mi tetap tinggal di tempatnya masing-masing dan menghentikan segala permusuhan. (Maksum, Agus Sunyoto, dan A. Zaenuddin, 1990 3).

Sementara itu untuk mengawasi gencatan senjata dibentuklah komisi konsuler yang anggota-anggotanya terdiri dari para Konsul Jenderal yang ada di Indonesia. Komisi PBB ini di Indonesia dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan wakil-wakil Amerika, Australia dan Belgia. KTN tersebut dalam tugas dan fungsinya hanya memberikan usul dan saran, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memutuskan persoalan politik. Setelah KTN mengadakan pembicaraan, kedua belah pihak antara Indonesia dan Belanda. akhirnya

disepakati untuk kembali ke meja perundingan., Belanda mengajukan agar Jakarta sebagai tempat berunding, tetapi ditolak oleh pihak Indonesia. Sebab Indonesia menganggap bahwa Jakarta tidak ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dan tidak ada jawaban Republik Indonesia yang aktif akibat aksi militer. Akhirnya kedua belah pihak bersepakat bahwa akan berunding di sebuah kapal yang akan disediakan oleh KTN, yaitu kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu Renville pada bulan Januari 1947. Perjanjian di atas kapal tersebut terkenal dengan “Perjanjian Renville” (Riekiefs, 1980 340).

Delegasi Indonesia terdiri dan Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Amir Sastroamidjoyo, Dr. Tjoa Sik [en, Mr. Muhammad Roem, Agus Salim, Mr. Nasrun, dan Jr. Djuanda, serta Mr. Muhammad Natsir sebagai cadangan, Delegasi Belanda terdiri dan Abdul Kadir Widjoatmodjo, Jhr. Van Vredenburg, dan Mr. Muhammad Natsir dalam delegasi Renville sebenarnya berkaitan erat dengan terjadinya perubahan pada kabinet Amir Syarifuddin. Sebab, sejak tanggal 13 November 1947 Partai Masyumi bersedia untuk ikut duduk di dalam kabinet, sehingga kabinet Amir Syarifuddin secara struktural berubah dan Kabinet Nasional menjadi Kabinet Koalisi

Perjanjian Renville tersebut sangat merugikan pihak Indonesia sehingga ditentang oleh banyak golongan, antara lain adalah PNI dan Masyumi. Perjanjian tersebut yang merugikan bagi pemerintah Republik Indonesia adalah:

Semua pasukan-pasukan dan masing-masing pihak di daerah manapun juga yang telah disetujui untuk dikosongkan oleh tentara atau di daerah manapun di sebelah daerah pihak lain yang dikosongkan oleh tentara, akan pindah dengan aman ke daerahnya sendiri yang dikosongkan oleh tentara dengan membawa semua senjata dan perlengkapan militer dibawah pengawasan pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara. Kedua belah pihak berusaha memudahkan perpindahan secara cepat dan damai dan pasukan-pasukan yang bersangkutan (Nasution, 1978: 463-464).

Dalam naskah perjanjian itu ditetapkan supaya Republik Indonesia menarik tentara gerilyanya dan daerah kantong-kantong. Penarikan ini berarti bahwa daerah yang sangat strategis bagi pejuang bersenjata dikosongkan dan diserahkan

pada kekuasaan Belanda. Belanda sendiri ingin menceraikan kedaulatan Indonesia dengan mendinikan banyak negara-negara boneka, seperti Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara .Pasundan dan Negara Kalimantan Timur. Hal tersebut mengakibatkan wiiayah Indonesia semakin menyempit.

Pembentukan negara-negara boneka tersebut, oleh Van Mook kemudian disusun dalam suatu federasi, Dalam pada itu daerah Republik Indonesia yang tinggal sedikit diblokade dengan hebat oleh Belanda sehingga perekonomian Indonesia menjadi sangat payah keadaannya.

Mengenai tafsiran antara kedua belab pihak terdapat perbedaan-perbedaan. Pihak Indonesia mau menerima persetujuan Renville, karena merasa akan mendapat jaminan dan KTN, bahwa kekuasaan Republik tidak akan berkurang selama masa peralihan sampai diserahkan kedaulatan oleh Belanda kepada negara Federal Indonesia. Republik akan mendapat perwakilan di dalam pemerintahan negara Federal Indonesia.

Belanda tidak menyetujui penjelasan tentang prinsip-prinsip politik ini, karena beranggapan bahwa Republik hanya merupakan golongan minoriter diantara Negara Indonesia Serikat dalam Negara Federal Hal mi menyebabkan terjadinya kegentingan antara Republik dengan Belanda schingga sebelum meletusnya pemberontakan PKI Madiun, Belanda telah bersiap-siap untuk mengadakan penyerbuan ke Yogyakarta.

Sementara itu karena siluasi politik serta ekonomi yang semakin sulit dan buruk dalam menghadapi Belanda makin dipersulit dengan adanya pertentangan-pertentangan di dalam negeri sendiri. Partai Masyumi dan PNI yang tidak menyetujui isi perjanjian Renville, menarik anggota-anggotanya dan kabinet. ini mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin bubar.

Sebagai gantinya dibentuk kabinet baru dengan PM Mohammad Hatta. Pada tanggal 29 Januari 1948 kabinet presidensial Hatta diumumkan tanpa mengikutsertakan kelompok kiri (Kedaulatan Rakyat, 31 Januari 1948). Ketidakikutsertaan kelompok kiri yang terdini dan kelompok berhaluan komunis seperti Pesindo, BTI dan PBI ini karena adanya masalah dengan semakin meningkatnya aktifitas kelompok tersebut yang semakin kuat, sehingga

pemerintah mengkhawatirkan kerusakan yang mungkin terjadi diakibatkan oleh pantai Komunis ini, baik yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menjaga situasi keamanan dalam negeri batas-batas wilayahnya dan penerapan ketentuan-ketentuan utama dalam program rasionalisasi militer (David Charles Anderson, 2003: 40-41) Pengubahan sistem kabinet ini karena pada kenyataannya selama menggunakan kabinet panlementer selalu terjadi pertentangan dan tidak pernah ada kesepakatan satu tujuan. Dengan kabinet presidensiil, diharapkan hal itu dapat dihindari. Pada tanggal 3 Februari 1948 kabinet ini dilantik oleh Presiden Soekarno dengan program kerja sebagai berikut:

1. pelaksanaan persetujuan Renville tentang gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik serta melanjutkan perundingan dengan Belanda lewat komisi jasa-jasa Baik dan dewan Keamanan.
2. mempercepat pembentukan suatu Republik Indonesia serikat yang demokratis dan berdaulat.
3. rasionalisasi ekonomi dan angkatan perang Republik.
4. perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh perang dan pendudukan Jepang.

Tugas yang dihadapi kabinet ini sangat berat karena merupakan warisan dan kabinet sebelumnya, sehingga kabinet ini harus bertindak tegas menghadapi setiap masalah yang muncul. Karena tugas berat ini, maka kabinet Hatta disebut sebagai kabinet Pisau Cukur (Nusional, 1 Februari 1948). Dinamakan demikian karena mempunyai arti berusaha memotong pengaruh paham komunis yang sebagian telah tertanam pada rakyat Indonesia. Hatta dengan kabinet barunya menghadapi persoalan-persoalan yang sangat rumit, yaitu dengan adanya tekanan ekonomi dan pihak Belanda serta menghadapi persoalan-persoalan politis. Secara ekonomis Indonesia mengalami kesulitan akibat pertama, blokade ekonomi dan pihak Belanda. Kedua, beredarnya uang palsu (Hatta, Mohammad. 1971: 15) Kesukaran-kesukaran ini ditambah lagi dengan masuknya para pengungsi dan tentara Hijrah Siliwangi dibawah pimpinan Kolonel Nasution yang jumlahnya tidak kurang dan 1 juta (Kahin, 1995 : 330). Disebut hijrah karena istilah tersebut mengingatkan kembali perpindahan Nabi Muhammad dan Mekkah ke Madinah setelah mengalami kemenangan. Perpindahan ini juga dialami oleh 22.000 tentara

Siliwangi dan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda menuju ke wilayah Jawa Tengah yang dikuasai Republik pada bulan Februari 1948.

Pada awalnya kekuatan utama dan tiga puluh lima ribu pasukan Siliwangi yang hijrah dan Jawa Barat di bawah persetujuan Renville, dikelompokkan dalam dua brigade utama. Brigade pertama dipimpin oleh Letkol Kusno Utomo yang berbasis di wilayah Yogyakarta, sedangkan brigade kedua dipimpin Letkol Sadikin yang ditempatkan di Surakarta. Selain itu masih terdapat sebuah brigade cadangan Siliwangi di Magelang yang dipimpin oleh Letkol. Edy Sukardi, empat ribu pasukan dan Jawa Barat yang ditempatkan di Madiun, sejumlah detasemen yang ditempatkan di daerah tempat produksi minyak Cepu, dan masih ada lainnya yang tersebar di Kabupaten Pati dan Bojonegoro, Pada akhir Maret 1947, peminintah Republik meminta kepada penguasa Belanda untuk mengizinkan para demobilisan asal Jawa Barat, yang untuk sementara disatukan dalam Brigade Pembangunan, untuk kembali ke dalam propinsi asal mereka dimana mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat (Hatta, Mohammad, 1971: 38).

Semenjak bulan Juni 1947 sampai bulan Januari 1948, sejumlah 60.000 anggota tentara telah dirasionalisasikan dan 40.000 orang lagi akan menyusul. Tujuan dan Rera ketentaraan ini adalah untuk melepaskan tenaga-tenaga produktif dan sektor pertahanan ke sektor produksi. Menuntut PM Moh. Hatta, ada tiga cara untuk melakukan hal tersebut:

- a. Melepaskan mereka yang ingin kembali pada pekerjaan semula seperti guru dan pamong praja.
- b. Menyerahkan bekas tentara ini kepada Kementrian Pembangunan dan pemuda untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
- c. Mengembalikan 100.000 orang kembali ke dalam masyarakat desa menjadi petani.

Hatta mengatakan bahwa masalah terbesar dan pelaksanaan program ini adalah tantangan psikologis, karena kembali ke desanya menjadi petani dan menanam singkong serta membuat saluran air dianggap sebagai pekerjaan romusha.

Rencana program dan kabinet Hatta tersebut sangat menggelisahkan Amir Syarifuddin dan Pesindo-nya, karena akan terkena rasionalisasi dengan dibubarkannya TNI Masyarakat sejak tanggal 15 Mei 1948 (Mabes ABRI, 1995: 98). Sikap dan program Hatta ini mendapat kecaman dari Amir Syarifuddin, yang merasa dirugikan karena menggunakan kekuatan-kekuatan revolusioner untuk merebut kekuasaan. Ia berusaha menyatukan seluruh golongan Marxis dalam wadah Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 26 Februari 1948 (A.H. Nasution, 1967 : 15). FDR kemudian menggunakan tenaga rakyat terutama para petani untuk menggerakkan revolusi dan bawah. FDR berusaha memancing bentrokan dengan lawan-lawan politiknya, Tahap selanjutnya disusul dengan pengacauan-pengacauan antara lain pengacauan ekonomi dengan adanya pemogokkan buruh di pabrik karung Delanggu pada tanggal 5 Juli 1948 (*Buruh*, 22 Juli 1948).

Dalam situasi yang kacau dalam tubuh FDR, muncul tokoh Suripno yang membawa Muso, seorang anggota PKI kawakan yang telah lama bermukim di Moskow, Rusia. Ia membawa garis perjuangan baru yang menarik sehingga banyak tokoh-tokoh Marxis yang kemudian bergabung dengan PKI, seperti Amir Syarifuddin, Pesindo, Barisan Tani Indonesia dan sisa-sisa FDR lainnya. Sesuai dengan rencana mereka, kekacauan demi kekacauan mereka lancarkan di wilayah-wilayah pedesaan Yogyakarta maupun Surakarta yang nantinya akan meletus menjadi Madiun Affai tanggal 18 September 1948 (Maksum *et al*, 1990: 16).

Insiden-insiden yang terjadi di daerah Surakarta antara lain adalah insiden militer di Tasikmadu dan di Srambatan. Insiden di Tasikmadu terjadi antara Batalyon I Brigade XIII/Kra "Z" dibawah pimpinan Mayor Rukman dengan Batalyon Singowareng/Divisi IV dan pasukan Tentara Pelajar. Sedangkan insiden di Srambatan terjadi karena adanya penculikan terhadap beberapa orang perwira komando pertempuran Panembahan Senopati, bebrapa orang anggota FDR serta beberapa orang anggota Barisan Banteng (Mabes ABRI, 1995: 65-66). Selain itu, pada pertengahan bulan September 1948, pertempuran terbuka antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang pro PKI dan pro pemerintah meletus di Surakarta, sedangkan di Yokyakarta sekitar 200 orang anggota PKI melakukan kekacauan di

wilayah pedalaman dengan pembunuhan yang bersistem santri abangan, yaitu pembunuhan terhadap orang-orang pesantren yang dicurigai melawan PKI. Pembunuhan ini diawali terhadap pimpinan pesantren kemudian menjalar kepada santri-santrinya. (Ricklefs, 1998:16).

B. Pemberontakan PKI Tahun 1948

1. Persiapan Pemberontakan.

Sebelum PKI Madiun meletus pada tanggal 18 September 1948, FDR lebih meningkatkan kegiatan mereka dengan melakukan agitasi politik mengancam kebijaksanaan dan strategi pemerintah serta memperkuat golongan oposisi dengan cara menyempurnakan organisasi PKI. Kaum komunis yang berada di Sold memperkuat diri dengan mendirikan suatu pasukan yang disebut Tentara Merah, atau dikenal dengan nama Tentara Muso. Akan tetapi Tentara Hijrah dan Tentara Pelajar berhasil mengusir golongan komunis itu hingga ke daerah Pati, sehingga akhirnya mereka bergabung dengan pengikut Muso di Madiun.

Dengan terdesaknya FDR atau PKI dan Solo, maka mereka mandur sampai di Madiun. Sisa-sisa kesatuan-kesatuan Pesindo dan Brigade ke-29 TNI Masyarakat yang berpangkalan di Kediri di bawah pimpinan Mayor S. Mustofa bergerak ke arah Madiun, dimana mereka bergabung dengan pasukan-pasukan polisi non reguler, BPPJ dan Pesindo yang dipimpin oleh Sumarsono. Terjadilah kemudian sejumlah perkembangan baru sejak 16 September yang membuat para pemimpin laskar di Madiun meragakan apakah strategi defensif mereka sebelumnya akan mampu digunakan. Di Madiun mereka melakukan gerakan *coup* terhadap daerah 1W dan dalam waktu yang singkat daerah Madiun dapat dikuasai. Kemudian menyusul daerah-daerah Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi, Blora, Trenggalek dan Pati (Ricklefs, 1998: 344).

Adapun strategi pemberontakan PKI Madiun seperti yang telah direncanakan oleh Muso dalam dokumen yang ditemukan di rumah Amir

Syarifuddin dalam sebuah penggebrekan yang dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pasukan yang ada di bawah pengaruh atau pro FDR/PKI Muso ditarik dan medan pertempuran dan ditempatkan di daerah-daerah yang strategis bagi mereka.
2. Daerah Madiun dijadikan daerah gerilya, sektor yang kuat melanjutkan perjuangan.
3. Daerah Solo dijadikan “*Wild West*” agar perhatian umum selalu tertuju ke sana.
4. Di samping tentara resmi didirikan tentara ilegal.
5. Diadakan demonstrasi besar-besaran yang disusul dengan pemogokkan umum, kalau perlu dengan tindakan kekerasan.
6. Mengadakan aksi legal.

(A.H. Nasution, 1967: 19-20).

Bahwa satu bagian dan rencana FDR/PKI lagi menyebutkan untuk melakukan cara-cara pasal 6, yaitu aksi legal maka tindakan ilegal nyata harus segera dilakukan

- a. Supaya menimbulkan kekacauan di mana-mana.
- b. Tindakan keras kalau perlu penculikan terhadap orang yang melawan rencana FDR/PKI

2. Jalannya Pemberontakan

Pada tanggal 18 September 1948, terjadilah pertempuran yang dilakukan FDR/PKI terhadap Kantor Polisi Gorang Gareng, 10 kilometer kota Magetan, atau 15 kilometer sebelah barat Madiun. Pertempuran tersebut merupakan babak baru dan aksi-aksi lanjutan FDR/PKI yang telah direncanakan sedemikian rapi. Buktinya, pada saat yang sama kesatuan-kesatuan bekas laskar Badan Perjuangan dan TNT Masyarakat yang tergabung dalam Brigade 29 pimpinan Letkol Muhammad Dachlan menyerang markas SPDT (Staf Pertahanan Djawa Timur), markas PTRI (Polisi tentara Republik

Indonesia), dan tangsi polisi di Madiun. Pada pukul 10.00 Will Radio Gelora Pemuda yang telah menjadi milik FDR/PKI mengumumkan pemerintahan baru Republik Soviet Indonesia, dengan susunan pemerintahan yang terdiri dari

1. Abdul Muntalib, selaku Residen.
2. Sumarsono, selaku Gubernur Militer.
3. Kolonel Djoko Sujono, selaku Komandan Militer.
4. Mayor Mustopo, selaku Komandan Militer Kota (Maksum, *et al*, 1990 : 23)

Meskipun pemberontakan terjadi di Madiun, pada kenyataannya pasukan elite justru ditempatkan pada posisi strategis militer di Kediri. Sebab dengan ditempatkannya pasukan tersebut di sana, gerakan pasukan pemerintah yang datang dan sebelah barat akan terus dipancing hingga ke Kediri yang nantinya akan dihantam FDR/PKI di sana. Sedangkan tentara Siliwangi yang datang dan arah barat akan terperangkap di kawasan Magetan yang dipimpin oleh Mayor Darmo Mintoaji. Di Madiun sendiri FDP/PKI sudah menempatkan 2 batalyon yang dipimpin oleh Mayor Padjang Djoko Priyono. Batalyon ini adalah batalyon Pesindo yang sernula bermarkas di Gresik, kemudian di tank ke Madiun. Sementara itu untuk mendukung kekuatan batalyon ini, ditempatkan batalyon Mursid di kawasan Saradan. Sedangkan di kawasan Cepu dan Pati ditempatkan batalyon Mustofa dengan pertahanan sayap kanan FDR/PKI di Ngawi. Di Ponorogo ditempatkan batalyon Abdul Rahman sebagai pertahanan sayap kiri, yang merentang sampai ke kawasan Pacitan sebagian besar anggota FDR, dan hal itu menimbulkan suatu keseimbangan dalam tubuh FDR untuk menentukan pilihan antara Presiden Sukarno atau Muso.

Sementara itu, daerah-daerah yang berhasil diduduki oleh Muso ternyata tidak lama, bahkan dalam serangan memperluas wilayah banyak mengalami kegagalan. Hanya dalam waktu dua minggu sejak pemberontakan tanggal 18 September 1948 kota Madiun telah diduduki TNI dan kesatuan divisi Siliwangi. TNI juga dapat menguasai daerah-daerah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sejak gagalnya serangan umum FDR/PKI ke Ponorogo kekuatan mereka boleh dikatakan sudah bercerai berai meskipun pasukan mereka berusaha bergabung dengan Batalyon elite Maladi Yusuf di Madiun. Regu-regu, seksi seksi, dan peleton-peleton FDR/PKI banyak yang terpisah dan pasukan induk mereka. Muso yang mengalami kegagalan penyerangan di Ponorogo akhirnya mengundurkan diri dan pada tanggal 31 Oktober 1948 tewas tertembak di kampung Sumandang, Ponorogo. Sedangkan Amir Syarifuddin berhasil ditangkap di kawasan Alas Ketu, Purwodadi pada tanggal 16 Desember 1948 (Maksum *et al*, 1990: 124 dan 170).

Peranan Muso dalam pemberontakan PKI tahun 1948

Pada tahun 1948, pertikaian politik di Tanah Air begitu meruncing, terutama setelah ditandatanganinya Persetujuan Renville dan ditandatanganinya Undang-Undang No.3 tahun 1948 sebagai perwujudan dan mosi Baharuddin dan kawan-kawannya dan golongan sayap kiri. Isinya adalah bahwa APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) supaya ditempatkan di bawah Menteni Pertahanan. Dengan demikian terjadi kesatuan antara Kementerian Pertahanan dengan Angkatan Perang. (Maksum *et al*, 1990 : 9). Persetujuan Renville dan Undang-Undang No.3/1948 tersebut menjadi isu-isu yang dipertentangkan antara pemerintah dan golongan oposisi sayap kiri.

Pada mulanya FDP/PKI membela mati-matian Perjanjian Renville dan Undang-Undang No.3/1948 tersebut, karena mereka beranggapan dapat ikut masuk dan duduk dalam kabinet pemerintah. Namun kemudian FDR/PKI dengan lantang mengatakan agar Renville dan Undang-Undang No.3/1948 dibatalkan saja, karena ternyata mereka tidak ikut duduk dalam kabinet

Demikianlah gerakan-gerakan untuk menentang pemerintah semakin menghebat, seperti diketahui bahwa organisasi-organisasi buruh : SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Sarbupri adalah organisasi massa yang bernaung di bawah FDR/PKI. SOBSI ini adalah kelompok persatuan organisasi dagang terbesar yang beranggotakan 17.000 orang di pertengahan tahun 1948

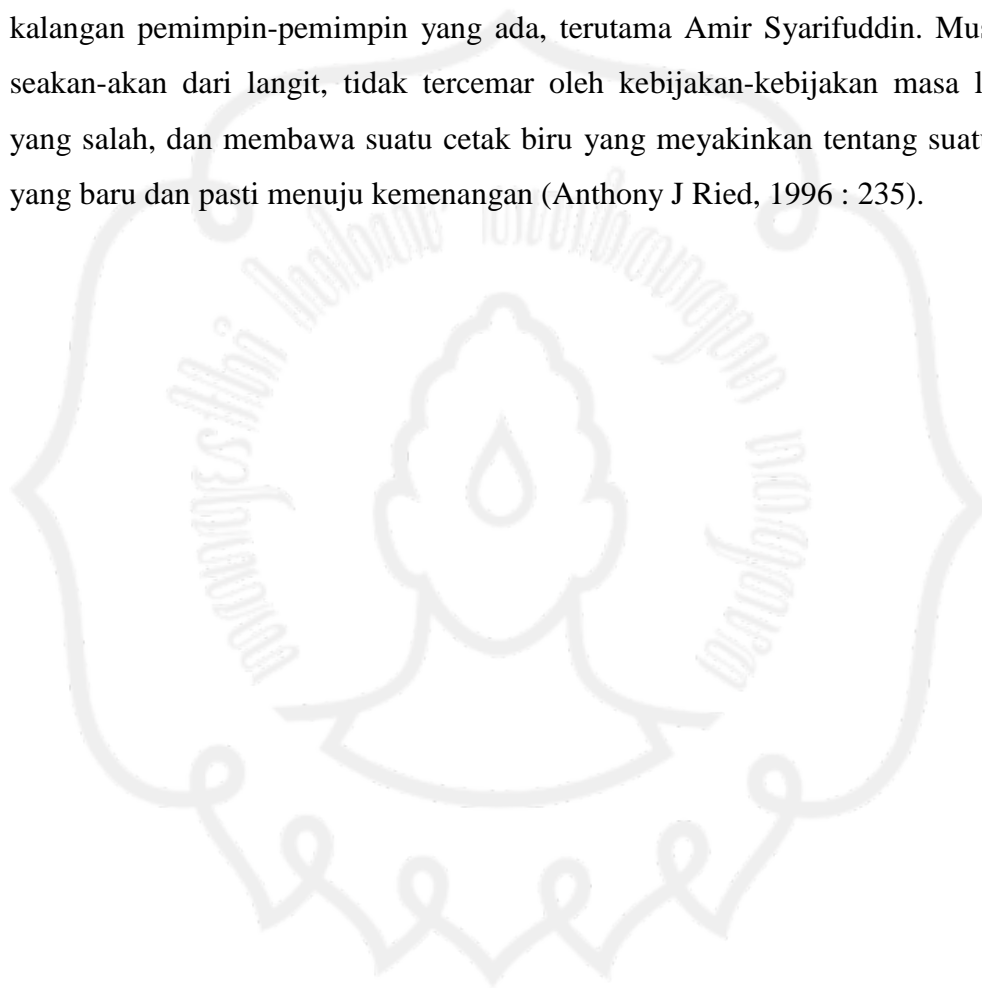
(Kahin, 1995: 336), FDR/PKI menggunakan organisasi massa tersebut dalam menentang pemerintah untuk memaksakan kemauannya. Demikianlah pemogokan Delanggu yang didalangi oleh FDR/PKI dalam rangka menentang pemerintah, sehingga pemogokan tersebut sampai pada bentrokan senjata dan memakan korban manusia. (Dr. A.H. Nasution, 1967: 14-15).

FDR/PKI pada akhirnya merasa memperoleh kekuatan yang lebih besar setelah tokoh PKI yang memberontak tahun 1926, Muso, datang ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948 setelah 22 tahun di Moskow. Ia datang bersama Suripno dan Praha - Cekoslovakia. (Maksum *et al*, 1990 : 6). Muso telah menghabiskan hampir seluruh waktunya di Moskow, Rusia sebagai seorang pengikut setia Stalin. Muso dikirim ke Indonesia untuk menjalankan suatu kebijaksanaan baru dan Gerakan Komunis internasional yang kemudian dikenal dengan nama Doktrin Dimirtov (Georgi Dimitov adalah sekretaris jenderal komintern tahun 1935 - 1943). Doktrin Dimitrov ialah bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kekuatan manapun juga, termasuk kaum imperialis, asal saja menghadapi kaum fasis (*Revolusioner*, 24 April 1946).

Dan sudut pandangan PKI, kembalinya Muso ini tepat sekali. Kedatangannya bersamaan dengan timbulnya gelombang pasang penuh ketidakpuasan orang Indonesia pada umumnya terhadap Amerika Serikat. Kepulangannya ke Indonesia setelah lebih dan dua dasawarsa bermukim di Moskow, Rusia tidak dapat ditafsirkan lain dan pada suatu bukti nyata bahwa ada kepentingan mendesak Moskow di Indonesia. Di kalangan anggota FDR, hal ini meningkatkan kecenderungan yang sudah meningkat karena Rusia bersedia membentuk hubungan konsuler, untuk mencari kepuasan bagi keinginan mereka yang lama tak terpenuhi untuk memperoleh kemerdekaan nasional (Kahin, 1995 : 344).

Dalam waktu singkat para politisi FDR/PKI yang terkenal dan berpengalaman jatuh ke dalam tangan pendaatang baru ini. Sifat-sifatnya yang menguntungkan adalah cara berpidatonya yang tegas dan berapi-api, reputasinya di kalangan PKI bawah tanah tahun 1935 dan wibawanya sebagai seorang penafsir pemikiran Soviet masa itu. Lepas dan pandangan umum yang muncul karena

catatan revolusionernya dan karena baru saja pulang dan Moskow, Muso juga beruntung karena oleh anggota PKI serta anggota Partai Sosialis dan Partai Buruh yang pernah menjadi anggota “PKI Illegal” (didirikan oleh Muso pada tahun 1935), ia dipandang sebagai pemimpin khusus mereka. Meskipun begitu sulit dipercaya bahwa ia diperbolehkan memimpin FDR/PKI di dalam menempuh suatu haluan yang ternyata membawa bencana kalau bukan karena demoralisasi di kalangan pemimpin-pemimpin yang ada, terutama Amir Syarifuddin. Muso tiba seakan-akan dari langit, tidak tercemar oleh kebijakan-kebijakan masa lampau yang salah, dan membawa suatu cetak biru yang meyakinkan tentang suatu jalan yang baru dan pasti menuju kemenangan (Anthony J Ried, 1996 : 235).



BAB III

KESIMPULAN

Peranan Muso dalam pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun terkait dengan pembentukan ideology komunis Indonesia. Muso yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Moskow, Rusia sebagai penganut setia stailin mendapatkan doktrin – doktrin komunis dari Stailin. Kedatangannya pada saat itu sangat tepat dalam mempengaruhi rakyat yang saat itu mengalami kekecewaan pada Amerika Serikat sehubungan dengan teringkarinya perjanjian Renville oleh Belanda. Muso mencoba menanamkan pengaruh bahwa Russia bersedia memberikan bantuan bagi rakyat Indonesia yang telah lama menginginkan terbentuknya kemerdekaan Nasional. Dalam waktu singkat, Muso pun berhasil mempengaruhi dan dia dapat diterima oleh para politis PKI, Muso mulai menyusup masuk dalam program-program kerja PKI dengan menerapkan ajarannya yaitu “Jalan Baru” pemuda dan kaum buruh dan dipengaruhi agar mengikuti ajaran karena hal itu dipandang akan akan menguntungkan mereka. Alhasil, rakyat yang masih awam dan lugu menerima ajaran tersebut dan berdiri dibelakang PKI. Namun lambat laun pada akhirnya pemerintah mulai mengadakan pendekatan secara persuasife kepada rakyat sehingga rakyat sadar siapa sebenarnya Muso beserta rakyatpun bersatu melawan Muso dan pengikutnya. Muso pun akhirnya tewas tertembak pada tanggal 31 Oktober 1948.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelahiran Organisasi Wanita Tamansiswa dilatarbelakangi oleh kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi rakyat Indonesia terutama bagi kaum wanita, adanya kepincangan-kepincangan pada masyarakat tradisional yang menghambat kemajuan wanita seperti poligami, kawin paksa dan lain sebagainya. Adat istiadat yang kolot telah mendorong kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya yaitu dengan adanya gerakan emansipasi wanita yang dipelopori oleh R.A. Kartini. Cita-cita R.A. Kartini untuk membangun kesadaran kemajuan bagi kaum wanita, kemudian dilanjutkan oleh kaum wanita dalam Taman Siswa yang berada dalam pimpinan Nyi Hajar Dewantara, yang membantu dalam hal pendidikan wanita. Mengingat pentingnya peranan wanita Taman Siswa dalam bidang pendidikan wanita tersebut, maka pimpinan Taman Siswa akhirnya mengesahkan Organisasi Wanita Taman Siswa sebagai organisasi mandiri, maka tetap dalam koridor Organisasi Taman Siswa.
2. Eksistensi organisasi Wanita taman Siswa dalam lingkungan Taman Siswa yaitu untuk membantu segala kegiatan yang dilakukan oleh Taman Siswa khususnya pendidikan bagi kaum wanita. Adapun struktur organisasi wanita Taman Siswa yaitu terdiri dari: a) badan kekuasaan tertinggi dalam organisasi wanita Taman Siswa adalah kongres, b) Badan pusat wanita Taman Siswa adalah pimpinan tertinggi dan merupakan badan pelaksana, c) di tingkat daerah wanita Taman Siswa dipimpin oleh pengurus daerah Wanita Taman Siswa yang dipilih dalam konferensi, d) di tingkat cabang Wanita Taman Siswa dipimpin oleh cabang harian Taman Siswa yang dipilih dalam rapat

anggota Wanita Taman Siswa. Adapun tugas Wanita Taman Siswa adalah berusaha untuk mempertinggi dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran Taman Siswa, menjaga ketertiban dan keselamatan Keluarga Taman Siswa sehingga tidak akan terjadi perselisihan diantara anggota keluarga Taman Siswa dan sebagai anggota organisasi tunduk pada apa yang telah menjadi ketentuan anggota. Sedangkan kewajiban Organisasi Wanita Taman Siswa adalah wajib membantu Taman Siswa dalam segala usahanya terutama dalam pendidikan kewanitaan dan kesucian dalam masyarakat Taman Siswa, dan wajib menjalin hubungan dengan organisasi wanita lainnya.

3. Peranan Organisasi Wanita Taman Siswa dalam pengembangan pendidikan di Yogyakarta adalah meningkatkan pendidikan khususnya bagi kaum wanita, yang ditempuh dengan jalan, baik ke dalam maupun ke luar. Peran ke dalam Organisasi Wanita Taman Siswa yaitu : membantu Taman Siswa dalam segala usahanya baik di bidang kebudayaan dan pendidikan khususnya pendidikan kewanitaan seperti membantu Taman Siswa dalam menentang Undang-Undang Pengawasan Sekolah Liar yang dianggap menghambat kesempatan orang pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan peran keluar Organisasi Wanita Taman Siswa yaitu selalu aktif memperjuangkan peningkatan derajat dan martabat kaum wanita dengan cara menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi wanita lainnya.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah pendidikan. Adanya perbedaan hak untuk mendapatkan pendidikan antara kaum wanita dan laki-laki, mendorong munculnya gerakan emansipasi wanita yang bertujuan agar wanita dapat hidup mandiri dan sejajar dengan kaum laki-laki. Gerakan emansipasi wanita di Indonesia, orientasinya menekankan pada tingkatan kecerdasan individu, yang diperoleh dari pendidikan dan pengajaran. Dengan melalui bekal pendidikan dan tingkat kecerdasan yang tinggi kaum wanita akan mendapat

kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal. Untuk mencapai cita-cita kemajuan wanita, maka perlu adanya kerja sama dalam bentuk organisasi wanita.

2. Implikasi Praktis

Keberhasilan Taman Siswa khususnya dan Indonesia umumnya dalam melaksanakan pendidikan, membutuhkan peranan kaum wanita. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa pendidikan generasi muda di Yogyakarta pada waktu itu, terlebih lagi pendidikan kewanitaan banyak dikembangkan oleh kaum wanita. Selain itu dalam setiap kegiatan pertemuan organisasi-organisasi wanita di Yogyakarta banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain di luar organisasi wanita yang meminta nasehat kepada anggota maupun perkumpulan organisasi-organisasi wanita tersebut. Kaum wanita telah banyak mendarmabaktikan dirinya untuk kepentingan nusa dan bangsa, sehingga sampai sekarang pun wanita Indonesia umumnya dan Wanita Taman Siswa khususnya ikut berperan dalam pendidikan dan pembangunan nasional.

Karena kaum wanita itu mempunyai andil dalam pendidikan generasi muda, maka kaum wanita perlu menambah pengetahuan yang lebih luas, baik itu dengan melalui pendidikan formal atau non-formal yang berupa kursus seperti: membatik, menjahit dan lain sebagainya sehingga dapat berperan lebih aktif dalam pendidikan.

C. Saran- saran

1. Bagi organisasi kewanitaan di Indonesia diharapkan dapat merumuskan cita-cita organisasi Wanita Taman Siswa dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum wanita sehingga peran seorang wanita dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai pendidik utama bagi para putra putri bangsa.
2. Bagi kaum wanita pada umumnya diharapkan dapat meningkatkan peran sertanya agar menjadi wanita yang berpotensi dan mandiri tanpa harus meninggalkan kondratnya sebagai wanita, sehingga bisa menjadi wanita yang baik bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA





LAMPIRAN 1

Lambang Wanita Tamansiswa



Garuda Melambangkan kekuatan dan kemandirian dalam mencapai cita-cita yang tinggi dan luhur. Sayap bagian luar dilukiskan tujuh bulu (melambangkan 7 pasal Asas Tamansiswa 1922), dan bagian dalam lima bulu (melambangkan 5 sila Pancasila), sedangkan ekornya bagian luar tujuh bulu (Asas Tamansiswa 1922) dan bagian dalam lima bulu (5 darma ciri khas Wanita Tamansiswa), melukiskan secara simbolik dasar perjuangan Tamansiswa termasuk Wanita Tamansiswa mencapai cita-citanya.

Cakra Bentuk lingkaran dengan delapan ujung tombak (trisula), melambangkan senjata pamungkas yang digunakan untuk menghilangkan segala penghambatan dalam perjuangan. Delapan ujung trisula melambangkan delapan penjuru mata angin yang menyatakan hidup kemanusiaan (*universal*). Cakra berputar terus melambangkan dinamika.

Lingkaran : Lingkaran di bagian dalam melambangkan keabadian.

Teratai Tumbuh-tumbuhan yang hidup mencakup tiga alam karena akarnya di dalam tanah, batangnya di dalam air, daun bunganya di udara, melambangkan kehidupan yang sempurna. Bunga teratai terdiri atas 9 kelopak (9 merupakan angka tertinggi dan sempurna) melambangkan Wanita Tamansiswa mempunyai cita-cita

kehidupan yang tinggi dan sempurna.

Sumber : Nyi Lies Adiseputro. 2002. Peraturan Besar Wanita Tamansiswa. Yogyakarta:
Hal:42

Lampiran 2

Panji Wanita Tamansiswa



a. Bidang dan Warna

Bidang dan warna yang melingkari bunga teratai berwarna hitam, berarti hikmat dan dalam, serta tulisan di atas bidang tersebut berwarna putih, berarti suci. Bidang di dalamnya berwarna merah, berarti berani, di atas bidang tersebut terlukis bunga teratai berkelopak sembilan berwarna putih, berarti suci, serta daun berwarna hijau, berarti harapan.

b. Bentuk

Panji Wanita Tamansiswa berbentuk perisai dengan ukuran 50 x 75 cm (2:3). Di bagian bawah mulai Batas $\frac{2}{3}$ dari atas melengkung. Kain berwarna hijau, tulisan dan hiasan berwarna emas. *Gambar dan warna di tengah* : Lambang Wanita Tamansiswa, dengan warna sayap dan ekor kuning, berarti keluhuran.

c. Candrasengkala

Tulisan di bawah lambang berbunyi *Suci Tata Ngesthi Tunggal* berarti Tahun Jawa 1854 atau Tahun 1932 Masehi.

d. Lencana Wanita Tamansiswa

a. Lencana Wanita Tamansiswa berbentuk sama dengan Lambang, berukuran diameter 3 cm, terbuat dari logam.

- b. Warna lencana sama dengan Garuda Cakra yang ada pada Panji Wanita Tamansiswa.

Sumber : Nyi Lies Adiseputro. 2002. Peraturan Besar Wanita Tamansiswa. Yogyakarta: Hal:43

LAMPIRAN 3

Gambar Bendera Wanita Tamansiswa



- a. Warna** : Bendera Wanita Tamansiswa berwarna hijau di sudut kiri atas terdapat warna merah putih.
- b. Gambar di tengah** : Bunga teratai berkelopak 9 (sembilan) warna putih, berdaun warna hijau dengan tepi kuning emas.
- c. Tulisan** : Wanita Tamansiswa berwarna kuning emas melingkari bunga teratai.
- d. 1. Arti warna bendera**
- | | |
|-------------|--|
| Hijau | : Harapan, selalu berkembang, pendidikan |
| Merah | : Keberanian |
| Putih | : Kesucian |
| Merah Putih | : Kebangsaan |
| Kuning emas | : Keluhuran |
- 2. Arti warna Bendera**
- Pendidikan dengan kesucian yang berjiwa kebangsaan.
- Ukuran Baku

Bendera Wanita Tamansiswa berukuran 100 cm x 150 cm dengan bagian merah putih berukuran 32 cm x 48 cm, berjarak 2 cm dari tepi. Untuk ukuran lain berbanding 2:3

Sumber : Nyi Lies Adiseputro. 2002. Peraturan Besar Wanita Tamansiswa. Yogyakarta: Hal:44-45

LAMPIRAN 4

Stempel Wanita Tamansiswa



Stempel Wanita Tamansiswa berbentuk gambar lambang dikurangi sayap dan ekornya.

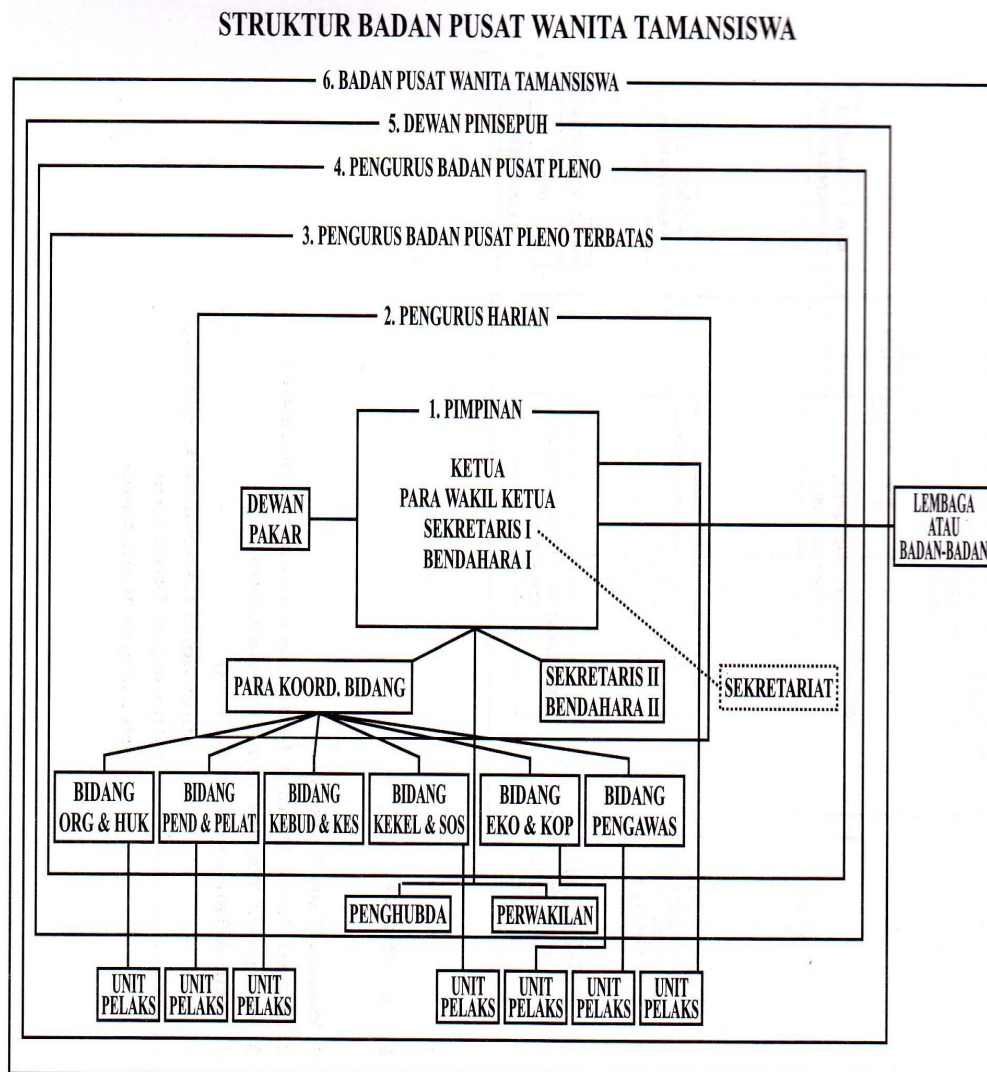
Bebentuk gambar cakra dengan teratai di dalamnya.

Di antara dua lingkaran terdapat tulisan : di bagian atas tertera tulisan Wanita Tamansiswa dan di bagian bawah menunjukkan keterangan, misalnya : Badan Pusat, Perwakilan Badan Pusat, nama Daerah, nama Cabang.

Sumber : Nyi Lies Adiseputro. 2002. Peraturan Besar Wanita Tamansiswa. Yogyakarta:
Hal:52

LAMPIRAN 5

Struktur Badan Pusat Wanita Tamansiswa



Sumber : Nyi Lies Adiseputro. 2002. Peraturan Besar Wanita Tamansiswa. Yogyakarta:
Hal:57

LAMPIRAN 6

Struktur Organisasi Wanita Tamansiswa



Sumber : Nyi Lies Adiseputro. 2002. Peraturan Besar Wanita Tamansiswa. Yogyakarta: Hal:58



LAMPIRAN